



**PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PETANI**

RUMPUT LAUT

Di Wilayah Kepulauan

Editor:
Bakri La Suhu | Rasid Pora



eureka
media aksara

Anggota IKAPI
No. 225/ITE/2021

- 0858 5343 1992
- eurekamediaaksara@gmail.com
- Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-637-6



9 786234 876376

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT

Di Wilayah Kepulauan

Bakri La Suhu
Abdul Halil Hi. Ibrahim
Vivi Noviyanti
Surdin La Sariha
Rasid Pora
Abdullah Kaunar



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT
LAUT
Di Wilayah Kepulauan**

Penulis : Bakri La Suhu
Abdul Halil Hi. Ibrahim
Vivi Noviyanti
Surdin La Sariha
Rasid Pora
Abdullah Kaunar

Editor : Bakri La Suhu
Rasid Pora

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-487-637-6

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,
JANUARI 2023
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021**

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan
teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis memanjatkan kehadiran Allah SWT atas berbagai limpahan rahmat, kesehatan dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku dengan Judul **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT DI WILAYAH KEPULAUAN”**. Buku pada prinsipnya berkaitan langsung dengan pemberdayaan, akan tetapi lebih spesifik pada pemberdayaan petani rumput laut di wilayah kepulauan; muatan dari risalah ini yakni :

Bab 1 Kerangka Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kepulauan terdiri dari : Pendahuluan, Prinsip Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, dan Masyarakat Petani Rumput Laut. Bab 2 Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut terdiri dari : Potret Singkat Desa Mano, Masalah Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput dan Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut. Bab 3 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengembangan Budidaya Rumput Laut terdiri dari : Pengantar, Kurangnya Pemasaran Hasil Panen Rumput Laut, Minimnya Modal Usaha untuk Pengembangan Budidaya Rumput Laut, Tidak Adanya Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Masyarakat Petani dan Kesimpulan.

Keberhasilan penulisan buku ini tidak lepas dari berbagai inovasi, motivasi dan target kami selaku penulis dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT). Risalah buku ini juga, sesungguhnya dapat dijadikan bahan kuliah dan atau referensi untuk akademisi, mahasiswa ataupun para pembaca dalam memahami dan mendalami kajian tentang pemberdayaan masyarakat di wilayah kepulauan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Harapan kami selaku penulis, semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian dalam bidang Ilmu Pemerintahan serta pengembangan pada aspek pemberdayaan masyarakat di wilayah Kepulauan. Tentu juga dalam penulisan karya Buku ini, masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, maka dari itu kami sangat mengharapkan kritikan, saran dan masukan yang sifatnya konstruktif dari semua pihak demi penyempurnaan karya Buku ini kedepannya.

Ternate, Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 KERANGKA ANALISIS PEMBERDAYAAN	
MASYARAKAT PESISIR KEPULAUAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Prinsip Pemberdayaan	7
C. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.....	12
D. Masyarakat Petani Rumput Laut.....	17
BAB 2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI	
RUMPUT LAUT	27
A. Potret Singkat Desa Mano	27
B. Masalah Pemberdayaan Masyarakat Petani	
Rumput	39
C. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Petani	
Rumput Laut	48
BAB 3 FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM	
PENGEMBANGAN BUDIDAYA	
RUMPUT LAUT	59
A. Pengantar	59
B. Kurangnya Pemasaran Hasil Panen	
Rumput Laut	62
C. Minimnya Modal Usaha untuk Pengembangan	
Budidaya Rumput Laut.....	67
D. Tidak Adanya Pelatihan dan Penyuluhan Bagi	
Masyarakat Petani.....	73
E. Kesimpulan.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
TENTANG PENULIS	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alat Transportasi Laut.....	39
Gambar 2 Peta Wilayah Pulau Obi	51
Gambar 3 Peta Lokasi Kawasan Pengembangan.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga Dan Jenis Kelamin Di Desa Mano	29
Tabel 2 Pembagian Wilayah Administrasi Desa Mano	30
Tabel 3 Jumlah Pendudukan sesuai dengan Tingkatan Pendidikan Terakhir Di Desa Mano	31
Tabel 4 Mata Pencaharian masyarakat Desa Mano.....	33
Tabel 5 Sarana Prasarana Pemerintah dan Pendidikan.....	34
Tabel 6 Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Keagamaan.....	35
Tabel 7 Jumlah Masyarakat Desa Mano Partisipasi Pendidikan	37
Tabel 8 Jumlah Hasil Panen/Produksi Masyarakat Petani Rumput Laut di Desa Mano	53
Tabel 9 Data Kelompok Masyarakat Petani Rumput Laut Di Desa Mano	55
Tabel 10 Bantuan Alat Produksi Masyarakat Petani Rumput Laut.....	57



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PETANI RUMPUT LAUT
Di Wilayah Kepulauan**

Bakri La Suhu
Abdul Halil Hi. Ibrahim
Vivi Noviyanti
Surdin La Sariha
Rasid Pora
Abdullah Kaunar



BAB

1

KERANGKA ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR KEPULAUAN

Bakri La Suhu
Abdul Halil Hi. Ibrahim

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.500 yang dikelilingi oleh laut seluas 5,8 juta km tersebut dihuni oleh penduduk dengan mata pencaharian terbesar sebagai tani dan nelayan. Mereka hidup dengan memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir. Akan tetapi bahwa masih kurang kesadaran masyarakat dalam melihat dan menyikapi makna penting dan strategisnya laut dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Kurangnya kesadaran masyarakat pesisir dalam mengelola hasil laut, dikarenakan ketidaktahuan masyarakat dalam memanfaatkan hasil hayati laut tersebut.

Kurang lebih 70 persen wilayah Indonesia terdiri dari laut, yang pantainya kaya akan berbagai jenis sumber hayati, dan lingkungannya sangat potensial untuk dikembangkan. Keadaan ini merupakan salah satu faktor

yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan yang serasi dan seimbang dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang hidupnya di pesisir harus semaksimal mungkin untuk memanfaatkan sumber daya hayati dari laut.

Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya dimana kehidupan sosial ekonominya tergantung pada sumberdaya laut merupakan segmen anak bangsa yang umumnya masih tergolong miskin. Kesejahteraan masyarakat pesisir memerlukan program terobosan baru yang dapat meningkatkan akses mereka terhadap modal, manajemen dan teknologi serta dapat mentransformasikan struktur dan kultur masyarakat pesisir dan nelayan secara berkelanjutan. Terobosan yang dimaksud yakni pemberdayaan bagi masyarakat pesisir yang ada di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pattiasina (2010:65), Pemberdayaan atau *empowerment* merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan dan pemikiran serta kecenderungan. Kecenderungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan, kecendrungan sekunder merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses *stimulasi*, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan mereka.

Menurut Payne (dalam Isbandi, 2008:77) pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan atau kekuatan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
2. Menjaga sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Suhendra (2006:74-75) pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan, kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya.

Menurut Sumodiningrat (1999:134), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan adalah upaya membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Jadi konsep pemberdayaan dalam implementasinya perlu keterpaduan antara kehendak pemerintah dan para Stake Holders melalui program-program dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga sasaran pembangunan menjadi terarah dan tepat guna (Mubyarto, 1998).

Selain itu, adapun jabaran dari pengertian pemberdayaan yaitu :

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial .
3. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.
4. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

5. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk :
 - a. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-baran dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan
 - b. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Suharto, 2004:10).

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat miskin dan kelompok lemah lainnya. Mereka adalah kelompok yang pada umumnya kurang memiliki keberdayaan. Oleh karena itu, untuk

melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari 'keumuman' kerap kali dipandang sebagai '*deviant*' (penyimpang). Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu (Parsons,1994:106).

Nikijuluw (2001:16), menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses untuk berdaya, memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga untuk menguasai sesuatu. Sebagai suatu proses, maka pemberdayaan merupakan langkah awal bagi masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dimana masyarakat bisa memiliki kekuatan, kemampuan serta menguasai

sesuatu yang mampu berdayakan kehidupan mereka, baik secara pribadi, keluarga maupun dalam masyarakat. Setiap program pemberdayaan yang dilaksanakan seyogianya mampu memberikan manfaat, baik bagi target grup maupun masyarakat sekitar (Nataniel, 2008:25) .

Proses pemberdayaan bagi masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan, pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Dalam memberdayakan masyarakat tentunya pemerintah berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus merupakan mandat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, sebagaimana pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Sehingga peran dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sangat diperlukan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

B. Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan mengupayakan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian (Payne, 1997:65).

Pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa untuk untuk memperkuat diri dan kelompok mereka dalam berbagai hal, mulai dari soal kelembagaan, kepemimpinan, sosial ekonomi, dan politik dengan menggunakan basis kebudayaan mereka sendiri (Taylor dan Mckenzie, 1992:26).

Pada proses pemberdayaan, ada dua prinsip dasar yang harus dipedomani (Saptana, *dkk*, 2003) yaitu :

1. Menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri.
2. Mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

Kebijakan ini diterjemahkan misalnya di bidang ekonomi berupa peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi dan pasar, sedangkan di bidang sosial politik berupa tersedianya berbagai pilihan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

Disisi lain, pemberdayaan kelembagaan pada masa depan perlu diarahkan agar berorientasi pada :

1. Pengusahaan komoditas (pangan/non pangan) yang paling menguntungkan,
2. Skala usaha ekonomis dan teknologi padat karya,
3. Win-win mutualy dengan kemitraan yang kolehial,
4. Tercipta interdependensi hulu-hilir,
5. Modal berkembang dan kredit melembaga (bank, koperasi, petani),
6. Kooperatif, kompetitif dan transparan melalui sistem informasi bisnis,
7. Memanfaatkan peluang di setiap subsistem agribisnis, serta

8. Dukungan SDM yang berpendidikan, rasional, mandiri, informatif, komunikatif, dan partisipatif (inovatif) (Elizabeth, 2007:14).

Pelaksanaan pemberdayaan terdapat beberapa unsur (Heri Darwanto, 2008), yaitu :

1. Partisipasi, yang berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang dibedayakan. Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana, tenaga ahli dll) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin.
2. Akses pada informasi, yaitu aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah.
3. Kapasitas organisasi lokal, yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada didalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang organized lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi.
4. Profesionalitas pelaku pemberdaya, yaitu kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah, LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi, dan

melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat.

Menurut Cholisin (2011:2) menjelaskan bahwa Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Dalam Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Selanjutnya Cholisin (2011:2-4) menjelaskan bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh

masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pematapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

C. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan pesisir (Satria dalam Satria 2009). Masyarakat pesisir dapat diklasifikasikan menjadi masyarakat yang bergantung secara ekonomi terhadap sumber daya pesisir dan masyarakat yang bergantung secara spasial terhadap sumber daya pesisir. Perbedaan sosiologi antara masyarakat pesisir dan masyarakat pedesaan adalah pada rekonstruksi masyarakat (Satria 2002). Masyarakat pesisir

berbasis sumber daya sementara masyarakat pedesaan berbasis komunitas.

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial ekonominya tergantung pada sumberdaya kelautan (Saad 2003). Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik sumberdaya alam yang dihadapi. Masyarakat pesisir menghadapi sumberdaya alam yang dapat dikontrol, mobilitas usaha relatif rendah dan unsur resiko tidak terlalu besar, sedangkan nelayan yang bekerja menangkap ikan di laut menghadapi sumberdaya alam yang terbuka dan sulit di kontrol. Keadaan ini menyebabkan mereka harus berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal. Resikonya menjadi sangat tinggi dan akibatnya nelayan perikanan tangkap memilih karakter yang keras dan tegas (Satria 2000) (www.kp3k.dkp.go.id, 2016)

Menurut Satria (2009), karakteristik masyarakat pesisir sebagai representasi komunitas desa-pantai dan desa terisolasi, berikut adalah karakteristik dari berbagai aspek:

1. Sistem pengetahuan

Pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan pada umumnya didapat dari warisan orang tua atau pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris. Kuatnya pengetahuan lokal tersebut yang selanjutnya menjadilah satu faktor penyebab terjaminnya kelangsungan hidup mereka selaku nelayan.

2. Sistem kepercayaan

Secara teologis, nelayan masih memiliki kepercayaan yang kuat bahwa laut masih memiliki

kekuatan magis sehingga perlu perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin.

3. Peran wanita

Aktivitas ekonomi wanita merupakan gejala yang sudah umum bagi kalangan masyarakat strata bawah, tidak terkecuali wanita yang berstatus sebagai isteri nelayan. Umumnya, selain banyak bergelut dalam urusan domestik rumah tangga, istri nelayan tetap menjalankan juga fungsi-fungsi ekonomi dalam kegiatan penangkapan di perairan dangkal, pengolahan ikan, maupun kegiatan jasa dan perdagangan. Menurut Pollnac (1988) dalam Satria (2002), pembagian keluarga nelayan adalah pria menangkap ikan dan anggota keluarga wanita menjual ikan hasil tangkapan tersebut.

4. Struktur sosial

Struktur sosial merupakan pola perilaku berulang-ulang yang memunculkan hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat. Dalam mengkaji struktur sosial, ada dua elemen penting yang harus diperhatikan yaitu status dan peranan.

5. Posisi sosial nelayan

Posisi sosial nelayan berkaitan dengan peranan dan status nelayan sehingga struktur sosial dan posisi sosial nelayan sangat berkaitan erat hubungannya. Pada masyarakat pesisir, ciri umum yang dapat dikenali dari hubungan masyarakat pesisir adalah hubungan patron klien.

Masyarakat pesisir umumnya masih hidup dalam keterbatasan baik keterbatasan ekonomi, sosial, politik maupun keterbatasan dalam bidang pendidikan dan keterbatasan akses sumberdaya. Keterbatasan ekonomi ini nampak pada tingkat pendapatan masyarakat pesisir yang pada umumnya masih rendah. Keterbatasan sosial terwujud pada ketidakmampuan masyarakat pesisir dalam mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan yang ditunjukkan oleh kelemahan Menghadapi kenyataan kehidupan masyarakat pesisir yang seperti itu, maka ada dua pilihan yang dapat dilakukan masyarakat pesisir, yang pertama yaitu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan dan kedua yaitu melakukan perlawanan dengan kekerasan. Pilihan kedua tidak mungkin dilakukan mengingat kemiskinan yang dialami dan pendidikan yang dimiliki tidak mampu merespon setiap perubahan sosial ekonomi yang terjadi dilingkungan sekitarnya.

Menurut Kartasasmita (1995:24) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat pesisir adalah Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.

Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam membangun keberadaan diri pribadi, lingkungan, komunitas dan kelompok dalam melakukan proses

aktualisasi kemanusiaan yang adil. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat pesisir setidaknya merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan unit-unit sosial ekonomi dalam bentuk perangkat pranata sosial ekonomi dan orang yang ada dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu, yang penting untuk di landaskan adalah bagian mengatasi ketidakmampuan masyarakat pesisir terhadap keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari kondisi kemiskinan yang dialami sebahagian besar masyarakat pesisir.

Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak memperhatikan kondisi riil masyarakat lokal, tetapi didasarkan pada program-program intervensi dari atas. Proyek-proyek intervensi pada hakekatnya telah menghancurkan tatanan masyarakat lokal yang sudah ada sebelumnya. Proyek-proyek tersebut telah mengambil alih berbagai macam hak komunitas dan pemilikan masyarakat dengan dalih untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional.

Dimensi pemberdayaan masyarakat pesisir setidaknya diarahkan pada upaya penguatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang tidak saja berbasis pasar namun juga mempertimbangkan realitas politik, sosial, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam membangun keberadaan diri pribadi, lingkungan, komunitas dan kelompok dalam melakukan proses aktualisasi kemanusiaan yang adil. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat pesisir setidaknya merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan unit-unit sosial ekonomi dalam bentuk perangkat pranata sosial ekonomi dan orang yang ada

dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu, yang penting untuk di landaskan adalah bagian mengatasi ketidakmampuan masyarakat pesisir terhadap keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari kondisi kemiskinan yang dialami sebahagian besar masyarakat pesisir.

Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui pemberian wewenang kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Pentingnya memperhatikan aspek strategis adaptasi yang dikembangkan memungkinkan masyarakat pesisir mengatur daya tahan terhadap persoalan-persoalan spesifik seperti fluktuasi harga, ketidakpastian hasil panen. Strategi adaptasi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu diversifikasi dan intensifikasi (Riyadi, 2003:67).

D. Masyarakat Petani Rumput Laut

Fadholi Hermanto (1989), memberikan pengertian tentang petani yang mengatakan bahwa: "Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya dibidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha tani pertanian, peternakan, perikanan (termasuk penangkapan ikan), dan mengutamakan hasil laut".

Istilah petani asli dapat ditafsirkan sebagai konstruksi masyarakat desa paling tidak konstruksinya tentang sosok petani yang "sebenarnya" (the real peasant). Penambahan kata "asli" dalam kata "petani" menunjukkan, bahwa petani yang memiliki tanah sendiri adalah

gambaran ideal sosok petani yang hidup dalam konstruksi persepsi masyarakat. Di sini kita tidak bisa mendikotomikan "asli" dan "palsu", melainkan "citra ideal" dan "kenyataan empiri". Ideal dalam konteks ini tidak berarti hanya hidup dalam dunia ide dan harapan, karena bisa juga lahir dari sebuah kenyataan yang pernah ada. Itu artinya, persepsi tersebut lahir dari sebuah pandangan historis tentang petani yang pernah dikenal masyarakat di waktu lampau. Dengan kalimat lain, penambahan kata "asli" dalam kata "petani" menandakan bahwa secara historis apa yang disebut petani itu adalah orang yang menggarap dan mengelola tanah miliknya sendiri. Singkatnya, pengertian petani secara genuine adalah orang yang memiliki dan menggarap tanah miliknya sendiri (Slamet, 2000:20).

Konseptualisasi petani asli menunjukkan, bahwa tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan petani. Poin pentingnya bukan hanya terletak pada soal, bahwa tanah adalah alat produksi utama petani, melainkan bahwa alat produksi itu mutlak dimiliki petani. Implikasinya, petani yang tidak memiliki tanah sendiri tidak dianggap sebagai petani sejati atau asli. Implikasi politisnya, petani mutlak dan mempertahankan dan menjaga hak kepemilikannya atas tanah. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa konsep petani asli memiliki kaitan sosial-budaya-politik. (Sadikin M, 2001:31)

Dalam kamus Sosiologi karangan Soerjono Soekanto dikatakan bahwa yang dimaksud dengan petani (*peasant*) adalah seseorang yang pekerjaan utamanya bertani untuk konsumsi diri sendiri atau keluarganya. Sehubungan dengan penulisan buku ini, dapat dikatakan

bahwa yang dimaksud dengan petani yang di maksudkan adalah petani rumput laut, orang yang melakukan budidaya rumput laut dan nantinya akan di panen untuk dipasarkan ke pembeli rumput laut.

Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai potensi besar dalam memanfaatkan berbagai jenis rumput laut yang hidup di perairannya. Berbagai jenis rumput laut telah dikenal memiliki manfaat baik sebagai bahan pembuat agar-agar, keragian, maupun alginat. Berbagai jenis rumput laut pun telah berhasil dibudidayakan di pelbagai wilayah Indonesia. Rumput laut adalah nama umum untuk menyebut pelbagai jenis organisme laut yang dikenal sebagai alga. Penggunaan istilah rumput laut kadang menimbulkan kerancuan karena dipakai untuk menyebut dua kelompok tanaman laut yang berbeda, yaitu lamun (*seagrass*) dan gulma laut (*seaweed*). Justru di Indonesia kata rumput laut lebih sering digunakan untuk menyebut gulma laut (*seaweed*). Meskipun secara botani alga bukan golongan rumput-rumputan (<https://alamendah.org/2014/08/16/jenis-dan-manfaat-rumput-laut-di-indonesia>)

Rumput laut (atau lebih tepatnya gulma laut) adalah alga makroskopik yang hidup di perairan. Layaknya alga lainnya, rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seluruh bagian rumput laut disebut talus (*thallus*). Talus pada rumput laut ada yang tanpa percabangan dan bercabang-cabang dengan sifat mulai dari lunak, keras (diliputi zat kapur), seperti tulang rawan, hingga berserabut. Karena tidak memiliki akar, rumput laut hidup dengan menempel pada substrat (*fitobintes*) baik pasir, lumpur, kayu, karang mati, maupun kulit kerang. Rumput laut hidup di perairan laut dangkal

hingga kedalaman 200 meter. Daerah persebarannya mulai dari perairan beriklim tropis, subtropis, hingga perairan dingin, untuk daerah Indonesia cocok untuk dibudidayakan rumput laut ini.

Rumput laut adalah atau *sea weeds* secara ilmiah dikenal dengan istilah alga atau ganggang. Rumput laut termasuk salah satu anggota alga yang merupakan tumbuhan berklorofil. (<http://duniaplant.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-definisi-dan-manfaat-rumput.html>).

Anggadiredja (2006), ciri-ciri rumput laut yaitu thallus silindris, permukaan licin, menyerupai tulang rawan/muda, serta berwarna hijau terang, hijau olive, dan cokelat kemerahan. Menurut Sadhori (1992) berdasarkan kandungan pigmennya, rumput laut dikelompokkan menjadi 4 kelas yaitu ganggang merah, ganggang coklat, ganggang hijau dan ganggang biru hijau.

1. Ganggang Merah

Banyak sekali jenis dari ganggang merah ini yang menghasilkan agar-agar dan keragin, diantaranya adalah kelompok penghasil agar-agar contohnya *Gracilaria*, *Gelidium*, *Ahnfeltia*, *Pterocladia*, *Acanthopeltis*, dan kelompok penghasil karagin contohnya adalah *Chondrus*, *Eucheuma*, *Gigartina*, *Hypnea*.

2. Ganggang Coklat

Ganggang coklat dan juga ganggang merah hampir secara eksklusif merupakan habitat laut, oleh karena itu ganggang ini sering disebut dengan rumput laut. Ganggang coklat ada yang batangnya mengeras agar dapat menahan riak gelombang laut, ada pula

yang mempunyai alat penempel agar dapat menetap dengan kokoh pada tempatnya seperti labi-labi dan laminaria.

3. Ganggang Hijau

Ganggang ini berwarna hijau karena tidak mempunyai zat warna lain, kecuali hanya *chlorophyl* yang berwarna hijau sebagai satu-satunya cel warna yang ada.

4. Ganggang Biru Hijau

Kumpulan ganggang ini berwarna biru/hijau kebiru-biruan, karena disamping *chlorophyl* yang berwarna hijau, juga terdapat *phycoyanin* yang berwarna biru.

Rumput laut banyak digunakan sebagai bahan baku industri contohnya yaitu alga cokelat, yang digunakan untuk bahan baku es krim, pengolahan tekstil, pabrik farmasi, semir sepatu, dan pabrik cat. Alga merah untuk bahan baku industri makanan, farmasi, penyamakan kulit, dan pembuatan bir. Rumput laut digunakan sebagai bahan untuk pupuk tanaman, campuran makanan ternak, dan juga bahan baku kosmetika.

Manfaat yang paling dikenal dari rumput laut adalah untuk pembuatan agar-agar. Namun di samping itu rumput laut ternyata mempunyai manfaat-manfaat lainnya. Berikut adalah manfaat rumput laut :

1. Penghasil agar-agar; manfaat yang paling dikenal ini berasal dari rumput laut jenis *Gracilaria spp*, *Gelidium spp.*, dan *Gelidiopsis spp*.
2. Penghasil Peragian; proses kimia peragian dapat memanfaatkan rumput laut dari jenis *Eucheuma spp*.

3. Penghasil algin atau alginat; alginat dapat dihasilkan dari rumput laut berjenis seperti *Sargassum spp.*
4. Manfaat lainnya, antara lain sebagai obat tradisional, bahan makanan dan sayuran, bahan kosmetik dan kecantikan, penyerap karbondioksida. (<https://alamendah.org/2014/08/16/jenis-dan-manfaat-rumput-laut-di-indonesia>)

Sesungguhnya rumput laut memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, menurut Sutomo (2006) manfaat dari rumput laut yaitu :

1. Karena kandungan gizinya yang tinggi, maka mampu meningkatkan sistem kerja hormonal, limfatik, dan juga saraf
2. Kandungan yodiumnya diperlukan tubuh untuk mencegah penyakit gondok
3. Kandungan klorofil rumput laut bersifat antikarsinogenik, kandungan serat, selenium dan seng yang tinggi pada rumput laut dapat mereduksi estrogen. Disinyalir level estrogen yang terlalu tinggi dapat mendorong timbulnya kanker, sehingga konsumsi rumput laut memperkecil resiko kanker bahkan mengobatinya.
4. Kandungan vitamin C dan antioksidannya dapat melawan radikal bebas
5. Kaya akan kandungan serat yang dapat mencegah kanker usus besar, melancarkan pencernaan, meningkatkan kadar air dalam feses
6. Baik untuk diet, mengurangi resiko obesitas, serat pada rumput laut bersifat mengenyangkan dan kandungan karbohidratnya sukar dicerna sehingga akan menyebabkan rasa kenyang lebih lama.

7. Mengandung kalsium sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan susu, sehingga rumput laut sangat tepat dikonsumsi untuk mengurangi dan mencegah gejala osteoporosis.
8. Rumput laut digunakan sebagai obat tradisional untuk batuk, asma, bronkhitis, TBC, cacangan, sakit perut, demam, rematik, bahkan dipercaya dapat meningkatkan daya seksual. Di Cina, rumput laut juga biasa digunakan untuk pengobatan kanker. Tingginya tingkat konsumsi rumput laut berhubungan dengan rendahnya insiden kanker payudara pada wanita di negara tersebut. Hal itu disebabkan oleh kandungan klorofil rumput laut yang bersifat antikarsinogenik, karena kandungan vitamin C dan antioksidannya yang dapat melawan radikal bebas. Rumput laut bermanfaat untuk memperpanjang usia dan mencegah terjadinya penuaan dini.

Untuk penanaman rumput laut dikenal adanya beberapa metode yang sering digunakan masyarakat petani rumput laut antara lain :

1. Metode Lepas Dasar

Pada metoda ini bibit diikatkan pada batu-batu karang yang kemudian disebarakan pada dasar perairan. Cara ini sesuai untuk dasar perairan yang rata dan tidak ditumbuhi karang dan tidak berpasir. Cara ini mudah, sederhana dan tidak memerlukan sarana budidaya yang besar. Metoda ini jarang sekali digunakan karena belum diyakini keberhasilannya. Hal ini mengingat persyaratan yang diperlukan adalah areal yang terbuka terhadap ombak dan arus dimana terdapat potongan-potongan batu karang yang

kedudukannya sebagai substrant yang kokoh dan tidak terbawa oleh arus.

Disamping kesulitan mencari areal penanaman, metode ini mempunyai kelemahan antara lain : banyak bibit yang hilang terbawa ombak, tidak bisa dilaksanakan di perairan yang berpasir, banyak mendapat gangguan/serangan dari bulubabi, dan produksinya rendah. (Seri Pengembangan Hasil Penelitian Pertanian No 141P/KAN/PT 13/1990. Petunjuk Teknis Budidaya Rumput Laut Kemententian Kelautan dan Perikanan, 2011).

2. Metode Rakit Apung

Penanaman dengan metoda rakit ini menggunakan rakit apung yang terbuat dari bambu berukuran antara (2,5 x 2,5) meter persegi sampai (7 x 7) meter persegi tergantung pada kesediaan bahan bambu yang dipergunakan. Dalam PKT ini digunakan ukuran 7 x 7 meter persegi. Untuk penahanan supaya rakit tidak hanyut terbawa arus, digunakan jangkar sebagai penahanan atau diikat pata patok kayu yang ditancapkan di dasar laut. Pemasangan tali dan patok harus memperhitungkan faktor ombak, arus dan pasang surut air.

Metoda rakit cocok untuk lokasi dengan kedalaman 60 cm. Bahan-bahan yang diperlukan adalah bibit tanaman, potongan bambu berdiameter 10 cm. Potongan kayu penyiku berdiameter 5 cm, tali rafia, tali ris berdiameter 4 mm dan 12 cm, serta jangkar dari besi, bongkah batu atau adukan semen pasir. Adapun tahap-tahap penanamannya adalah sebagai berikut :

- a. Potongan kayu dan bambu dirangkai dan diberi jangkar pemberat dengan bantuan tali 12 mm.
- b. Thallus dengan berat masing-masing 100 gram diikatkan pada tali ris dengan menggunakan tali rafia yang berjarak antara 20 - 25 cm
- c. Jarak antara ris 50 cm sedangkan panjang ris sangat bergantung dari panjangnya rakit apung yang digunakan dalam budidaya.
- d. Tali ris yang sudah berisi tanaman diikatkan pada rakit

Dalam PKT ini setiap rakit apung berukuran 7 x 7 meter akan ditanami 500 titik tanam rumput laut atau setiap kelompok tani 5 orang dengan 250 rakit (dengan luas total sekitar 1,25 Ha) akan mempunyai titik tanam sebanyak 125.000 titik tanam (Seri Pengembangan Hasil Penelitian Pertanian No 141P/KAN/PT 13/1990. Petunjuk Teknis Budidaya Rumput Laut Kemententian Kelautan dan Perikanan, 2011).

3. Metode Lepas Dasar atau Tali Gantung

Pada penanaman dengan metoda lepas dasar, tali ris yang telah berisi ikatan tanaman direntangkan pada tali ris utama. Pengikatan tali ris pada tali ris utama sedemikian rupa sehingga muda dibuk kembali. Tali ris utama yang terbuat dari bahan polyetilen berdiameter 8 mm direntangkan pada patok. Jarak tiap tali ris pada tali ris utama 20 cm. Patok terbuat dari kayu berdiameter 5 cm sepanjang 2 m dan runcing pada salah satu ujungnya. Untuk menancapkan patok di dasar perairan diperlukan linggis atau palu besi.

Jarak tiap patok untuk merentangkan tali ris utama 2, 5 m. Dengan demikian pada retakan budidaya dengan metoda lepas dasar seluas satu are (100 m²) dibutuhkan 55 batang patok, 60 m tali ris utama dan 600 m tali ris dan 1 kg tali rafia. Untuk 1 unit budidaya rumput laut sistem lepas dasar ukuran 10 x 10 m² diperlukan bibit sebanyak 240 kg (Seri Pengembangan Hasil Penelitian Pertanian No 141P/KAN/PT 13/1990. Petunjuk Teknis Budidaya Rumput Laut Kemententian Kelautan dan Perikanan, 2011) Sama dengan metoda rakit apung, metoda ini cocok untuk perairan dengan kedalaman kurang 1,5 meter dan dasarnya terdiri dari pasir atau pasir berlumpur. Tahap Penanaman adalah sebagai berikut:

Tali ris dibentangkan berjajar pada pada dua rentang tali ris utama yang diikat masing-masing pada 2 patok yang berupa bambu yang tancap pada dasar laut, sehingga membentuk kerangka beberapa segi empat hamparan lahan penanaman rumput laut. Jarak antara tali ris sekitar 20 cm dan jarak antara titik tanam dalam tali ris sekitar 30 cm. Kerangka tanam seperti ini, diperhitungkan untuk setiap ha akan ada 99.000 titik tanam, atau untuk perhitungan 1 kelompok tani/nelayan dengan 125.000 titik tanam, memerlukan luasan lahan perairan sekitar 1, 3 ha.

BAB

2

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT

Vivi Noviyanti
Surdin La Sariha

A. Potret Singkat Desa Mano

Secara geografis Desa Mano terletak di Pulau Gamumu Wilayah Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, jadi termasuk Desa yang terluar bagian selatan dan termasuk Pulau Perbatasan antara Provinsi Maluku dengan Provinsi Maluku Utara. Dan Desa Mano bisa dikategorikan sebagai Desa Terluar, Terpencil dan Tertinggal karena jarak yang sangat jauh dengan pusat perkotaan baik Ibukota Kabupaten maupun Ibukota Provinsi sehingga termasuk daerah yang memiliki rentang kendali. Adapun Batas-batas Desa Mano adalah:

1. Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Laut Obi Selatan (Desa Wayaloar, Ocimaloleo dan Gambaru)
2. Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Laut (Desa Bobo, Desa Woi dan Laut Buano)

3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Buru.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Loleo.

Sedangkan luas wilayah Desa Mano mencapai 1257 Ha (4313m x 2915) yang terdiri dari :

1. Tanah Pemukiman warga : 80,5 Ha (2013m x 400m)
2. Tanah pertanian dan perkebunan warga : 928,9 Ha (3773m x 2462m)
 - a. Yang telah dipakai/ditanami 83 %.
 - b. Yang belum dipakai/ditanami 17 %
 - c. Lokasi yang tidak bisa bercocok tanam karena bebatuan : 241,1 Ha
3. Tanah lapangan bola kaki dan bola Voli : 1,2 Ha.
4. Lokasi pemakaman : 0,8 Ha.
5. Lokasi gedung sekolah (5 Lembaga Pendidikan) : 2,1 Ha.
6. Jalan, kantor, gedung pertemuan dll : 2,4 Ha

Jumlah penduduk Desa Mano Tahun 2016 mencapai 2.916 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.450 atau 49,4 % dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.466 jiwa atau 50,6 %. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebagaimana tercantum pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga Dan Jenis Kelamin Di Desa Mano

No	Penduduk	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
01	Kepala Keluarga	113 KK	117 KK	184 KK	192 KK	601 KK
02	(KK)	289	293	428	440	1.450
03	Laki-laki	243	315	458	450	1.466
	Perempuan					
	Jumlah	532	618	886	890	2.916

Sumber : Kantor Desa Mano, 2016

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Mano berada pada Dusun IV dengan jumlah penduduknya 890 jiwa, jumlah 192 Kepala Keluarga (KK), Laki-laki berjumlah 440 jiwa dan perempuan berjumlah 450 jiwa. Kemudian diikuti Dusun III dengan jumlah penduduknya 886 jiwa, jumlah 184 KK, Laki-laki berjumlah 428 jiwa dan perempuan berjumlah 458 jiwa.

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Mano terbagi ke dalam beberapa wilayah Dusun dan RT. Adapun jumlah Dusun dan RT sebagaimana tercantum dalam Tabel 2. Yakni :

Tabel 2 Pembagian Wilayah Administrasi Desa Mano

No	Nama Dusun	Jumlah RT
01	Dusun I	2 Rukun Tetangga (RT)
02	Dusun II	2 Rukun Tetangga (RT)
03	Dusun III	3 Rukun Tetangga (RT)
04	Dusun IV	3 Rukun Tetangga (RT)

Sumber : Kantor Desa Mano, 2016

Berdasarkan tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa desa Mano terbagi dalam 4 Dusun dan jumlah Rukun Tertangga (RT) terbanyak berada pada Dusun III dan Dusun IV masing-masing berjumlah 3 RT. Sedangkan untuk Dusun I dan Dusun II masing-masing berjumlah 2 RT.

Terkait dengan persoalan Pendidikan Masyarakat Desa Mano yang dikategorikan 17 tahun keatas dapat diperhatikan pada tabel berikut :

Tabel 3 Jumlah Pendudukan sesuai dengan Tingkatan Pendidikan Terakhir Di Desa Mano

No	Tingkatan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
01	Tidak Tamat SD	132	27	126	193	378
02	Tamat SD /Sederajat	119	83	178	241	621
03	Tamat SMP /Sederajat	29	91	62	89	271
04	Tamat SMA /Sederajat	23	88	53	73	237
05	Tamat D2	-	27	1	4	32
06	Tamat D3	2	14	9	5	30
07	Tamat S1	4	36	12	14	66
08	Tamat S2	-	4	-	-	4
09	Tamat S3	-	1	-	-	1
Jumlah		309	370	441	519	1640

Sumber : Kantor Desa Mano, 2016

Berdasarkan tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang berpendidikan berada pada Dusun IV dengan jumlah 519 orang dengan tingkat Tamatan SD/Sederajat berjumlah 241 orang, Tidak Tamat SD/Sederajat berjumlah 193 orang dan Tamat SMP/Sederajat berjumlah 89 orang. Kemudian diikuti Dusun IV dengan jumlah 441 orang, Tamat SD/Sederajat berjumlah 178 orang, Tidak Tamat SD/ Sederajat berjumlah 128 orang dan Tamat SMP/Sederajat berjumlah 62 orang. Sedangkan untuk Tingkat Pendidikan Strata Satu (S1) terbanyak pada Dusun II berjumlah 36 orang, dan diikuti Dusun IV berjumlah 14 orang, pendidikan Strata Dua (S2) berada pada Dusun II berjumlah 4 orang dan pendidikan Strata Tiga (S3) juga berada pada Dusun II berjumlah 1 orang.

Pada aspek mata pencaharian masyarakat Desa Mano mayoritas bermata pencaharian petani dan nelayan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4 Mata Pencaharian masyarakat Desa Mano

No	Jenis Pencaharian	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
01	Petani / Pekebun	196	145	184	223	748
02	Nelayan	56	131	162	193	542
03	Buru Pelabuhan	22	2	1	-	25
04	Tukang Kayu	4	5	3	6	18
05	Tukang Batu	3	6	4	3	16
06	PNS	1	28	12	6	49
07	TNI	1	1	4	-	6
08	POLRI	-	-	1	-	1
09	Pensiunan	-	-	-	-	-
10	Honoror	2	11	7	8	28
11	Pedagang	3	13	7	12	35
12	Lain-lain	20	28	56	68	172
Jumlah		309	370	441	519	1640

Sumber : Kantor Desa Mano, 2016

Berdasarkan tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa rata-rata mata pencaharian masyarakat desa Mano adalah petani/pekebun dengan jumlah 748 orang, nelayan berjumlah 542 orang, PNS berjumlah 49 orang, Pedagang berjumlah 35 orang, Honorer berjumlah 28 dan lain-lainnya berjumlah 172 orang.

Adapun sarana prasarana yang dimiliki pemerintah desa dan pendidikan yang ada di desa Mano, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Sarana Prasarana Pemerintah dan Pendidikan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Tahun Berdiri
01	Kantor Desa	1 unit	2014
02	Pos Keamanan (Pos Babinsa)	1 unit	1981
03		1 nit	1994
04	Puskesmas	2 unit	1993, 1995
05	Pembantu	4	2005,2006,2012,2013
06	Rumah Guru	Gedung	1998,2002,2007,2012
07	Gedung SD	4	1997,2001,2008,2012
09	Gedung Madrasah	Gedung	2010,2011,2012,2013
10	Iftidaiyah	4	2012
	Gedung Tsanawiah (MTs)	gedung 4	
	Gedung SMA	gedung	
	Rumah Perikanan	1 unit	

Sumber : Kantor Desa Mano, 2016

Berdasarkan tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana dimiliki oleh Desa Mano lebih banyak pada Gedung Pendidikan (Sekolah) yakni Gedung SD berjumlah 4 Gedung, Gedung Madrasah Iftidaiyah berjumlah 4 Gedung, Gedung Tsanawiah (MTs) berjumlah 4 Gedung, dan Gedung SMA berjumlah 4 Gedung. Sedangkan sarana dan prasarana pemerintah masih sangat terbatas karena hanya 1 unit saja untuk setiap gedung yang dimiliki.

Sementara untuk sarana prasarana pada aspek perhubungan dan aspek agama dapat digambarkan pada tabel 6 tersebut yakni :

Tabel 6 Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Keagamaan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
01	Jalan rabat beton	2351 m
02	Jalan tanah	1776 m
03	Jembatan darat beton	1 unit
04	Jembatan darat kayu	3 unit
06	(darurat)	2 unit
07	Tambatan perahu	24 unit
08	Sepeda motor	2 unit
	Masjid	

Sumber : Kantor Desa Mano, 2016

Berdasarkan tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pada aspek perhubungan lebih banyak jumlahnya dari pada aspek keagamaan. Sarana dan prasarana pada aspek perhubungan jumlahnya seperti sepeda motor 24 unit, Jembatan darat kayu (darurat) berjumlah 3 unit, Tambatan perahu berjumlah 2 unit, sedangkan sarana dan prasarana aspek keagamaan hanya Masjid berjumlah 2 unit bangunan.

Sementara untuk aspek kegiatan masyarakat dalam berpartisipasi pada dunia pendidikan dapat digambarkan pada tabel 7 berikut ini :

**Tabel 7 Jumlah Masyarakat Desa Mano Partisipasi Pendidikan
Tahun 2014**

No	Pendidikan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
01	TK	3	14	14	17	48
02	SD	37	68	73	82	263
03	Madrasah Iftidaiyah	57	24	32	43	156
04	Madrasah Tsanawiah	14	39	53	72	168
05	SMA	12	30	32	40	114
06	Perguruan Tinggi	6	33	24	21	84
Jumlah		129	208	228	275	840

Sumber : Kantor Desa Mano, 2016

Berdasarkan tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa masyarakat desa Mano yang masih menempuh pendidikan berjumlah 840 orang dengan tingkat pendidikan terbanyak SD berjumlah 263 orang, SMP/Madrasah Tsanawiyah berjumlah 168 orang, Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 156 orang, SMA berjumlah 114 orang, perguruan tinggi berjumlah 84 orang dan TK berjumlah 48 orang.

Transportasi merupakan alat (*tools*) yang digunakan untuk menghubungkan antar berbagai daerah. Sebagai daerah kepulauan, maka transportasi laut dan darat sangat penting untuk digunakan. Sistem sarana transportasi di Kepulauan Obi untuk bisa menjangkau dari suatu daerah/kawasan ke daerah lain dibagi menjadi 2 (dua) transportasi yaitu laut dan darat (Bakri dan Halil, 2022).

Obi yang mempunyai geografis wilayah kepulauan sehingga transportasi laut sangat dibutuhkan. Ada pelabuhan Jikotamo sebagai pusat transportasi laut di wilayah Kepulauan Obi. Terdapat kapal penumpang dan speed boat sebagai sarana untuk penyeberangan antar pulau. Untuk menuju kepulauan Obi hanya dapat ditempuh dengan sarana transportasi laut ke kota Laiwui. Perjalanan dari Labuha ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan ke pulau Obi ditempuh dengan menggunakan kendaraan kapal laut sekitar 7 jam dan 3,5 jam dengan menggunakan speed boat. Selanjutnya dengan kapal laut dari Labuha ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan ke Ternate dengan jarak waktu tempuh 8 jam.



Kapal Penumpang

Speed Boat

Gambar 1 Alat Transportasi Laut

Sarana dan prasarana transportasi darat yang menghubungkan dari desa ke desa maupun antar kecamatan sudah ada dan dalam kondisi baik. Terminal penumpang umum terdapat di Jikotamo dengan sejumlah armada angkutan darat yang siap melayani penumpang. Status jalan di wilayah pulau Obi adalah jalan provinsi dan kabupaten, jalan desa dengan kualitas jalan adalah jalan aspal, batu dan tanah. Di Jikotamo terdapat penyeberangan Kapal Very yang menghubungkan pulau Obi, Bacan dan pulau Halmahera. Sarana transportasi dliayani oleh angkutan umum antara desa berupa mikro bus ke desa Baru, Sambiki dan Anggai, sedangkan untuk angkutan dalam kota hanya tersedia bus dan ojek (Bakri, 2011).

B. Masalah Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput

Pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa untuk untuk memperkuat diri dan kelompok mereka dalam berbagai hal, mulai dari soal kelembagaan, kepemimpinan, sosial ekonomi, dan politik dengan menggunakan basis kebudayaan mereka sendiri (Taylor dan Mckenzie, 1992:26).

Pada proses pemberdayaan, ada dua prinsip dasar yang harus dipedomani (Saptana, *dkk*, 2003) yaitu :

1. Menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri.
2. Mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

Kebijakan ini diterjemahkan misalnya di bidang ekonomi berupa peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi dan pasar, sedangkan di bidang sosial politik berupa tersedianya berbagai pilihan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

Disisi lain, pemberdayaan kelembagaan pada masa depan perlu diarahkan agar berorientasi pada :

1. Pengusahaan komoditas (pangan/non pangan) yang paling menguntungkan,
2. Skala usaha ekonomis dan teknologi padat karya,
3. Win-win mutualy dengan kemitraan yang kolehial,
4. Tercipta interdependensi hulu-hilir,
5. Modal berkembang dan kredit melembaga (bank, koperasi, petani),
6. Koperatif, kompetitif dan transparan melalui sistem informasi bisnis,
7. Memanfaatkan peluang di setiap subsistem agribisnis, serta
8. Dukungan SDM yang berpendidikan, rasional, mandiri, informatif, komunikatif, dan partisipatif (inovatif) (Elizabeth, 2007:14).

Pelaksanaan pemberdayaan terdapat beberapa unsur (Heri Darwanto, 2008), yaitu :

1. Partisipasi, yang berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang dibedakan. Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana, tenaga ahli dll) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin.
2. Akses pada informasi, yaitu aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah.
3. Kapasitas organisasi lokal, yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada didalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang organized lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi.
4. Profesionalitas pelaku pemberdaya, yaitu kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah, LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi, dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, konteks pemberdayaan pada masyarakat lebih memfokuskan pada bidang usaha masyarakat agar dapat diberdayakan sehingga mampu meningkatkan kesejahterannya. Pemberdayaan

mengupayakan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian (Payne, 1997:65).

Pembudidaya rumput laut sebagai salah satu pelaku pembangunan kelautan dan perikanan yang memproduksi komoditi ekspor perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan secara serius dan berkelanjutan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk dapat menghasilkan produk rumput laut yang dapat bersaing di pasaran perlu manajemen usaha yang profesional. Hal ini dapat terwujud kalau usaha rumput laut dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas mengingat komoditi ini rentan terhadap kualitas dan pemasaran. Rumput laut merupakan salah satu komoditas hasil laut yang potensial untuk dikembangkan. Potensi rumput laut cukup besar dan tersebar hampir diseluruh perairan nusantara.

Maluku Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berada pada wilayah kepulauan. Sehingga jangkauan antara kabupaten/kota dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut. Sebagai wilayah kepulauan, tentunya masyarakat Maluku Utara dalam kehidupannya cenderung bergantung pada hasil laut dan pekerjaan masyarakat juga sebagai nelayan. Dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat nelayan, maka tentunya program-program pemberdayaan harus ada dan dilaksanakan hingga

menyentuh pada masyarakat nelayan (Bakri, Rasid, dkk, 2020).

Halmahera Selatan sebagai salah satu kabupaten kepulauan di Provinsi Maluku Utara, dengan luas lautan lebih besar dari daratan, memberikan pengaruh sosio kultur bagi kehidupan masyarakat setempat. Dengan kondisi geografis wilayah yang dikelilingi laut, maka praktis masyarakat di kabupaten ini tinggal dan menetap di daerah pesisir pantai. Kondisi geografis tersebut tentunya sangat berpengaruh pada orientasi masyarakat terhadap laut dan eksistensinya. Berbagai aktifitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Halmahera Selatan senantiasa menjadikan laut sebagai sarana utama dalam berbagai kegiatan kehidupan masyarakat tersebut. Untuk itu laut dalam pandangan masyarakat Halmahera Selatan bukan pemisah antara wilayah namun sebaliknya laut adalah penghubung antara wilayah, yang dapat memadukan berbagai kepentingan sosio kultur masyarakat (Daud, 2015). Umumnya masyarakat nelayan adat wilayah pesisir yang mendiami wilayah pesisir memiliki ikatan-ikatan dengan wilayah laut. Ikatan-ikatan istimewa tersebut berbentuk hubungan kultur antara komunitas masyarakat nelayan adat dengan wilayah laut. Suatu hubungan kultur biasanya telah dipercaya secara turun temurun dari generasi ke generasi. Selain hukum kultur, masyarakat nelayan biasanya sangat menyadari bahwa laut dan sumberdaya yang dimilikinya adalah anugerah tuhan yang sangat besar bagi manusia (Daud, 2015 dalam Bakri La Suhu, dkk, 2019).

Wilayah pesisir pulau Desa Mano adalah salah satu wilayah yang terletak di kabupaten Halmahera Selatan, yang memiliki potensi sumber daya perairan untuk pengembangan usaha di bidang perikanan (budidaya dan tangkap). Pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya perairan pantai di wilayah pulau Desa Mano diarahkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya secara efektif, efisien, optimal dan berkelanjutan, melalui program pemberdayaan masyarakat.

Kendala yang dihadapi oleh pembudidaya atau petani rumput laut di Desa Mano, adalah rendahnya kualitas rumput laut yang di hasilkan karena ketidakmampuan mereka memelihara sampai usia 40-45 hari yang di sebabkan mengalami kerontokan pada usia pemeliharaan dan serangan hama penyakit. Selain itu petani kesulitan modal usaha sering memaksa petani menjual rumput lautnya pada usia 30 hari, kondisi tersebut diatas di perparah dengan pemasaran situasi pada saat panen raya dimana harga rumput laut mengalami penurunan drastis dengan kisaran harga per kilogram basah Rp.7.000 ,- sedang pada waktu-waktu tertentu tidak pada saat panen raya harga per kilogram basah bisa mencapai Rp.9.000,-. Adanya fluktuasi harga yang tidak menentu dan permainan harga dari para pengepul menyebabkan petani mengalami kerugian, situasi semacam ini di alami petani hampir setiap tahun.

Pengelolaan kegiatan produksi, pemasaran dilakukan secara individu dan kegiatan atau usaha produktif dihadapkan pada masalah kesulitan permodalan, ketidakstabilan harga dan jalur pemasaran

yang terbatas. Petani jika berusaha secara individu akan terus berada di pihak yang lemah karena petani secara individu akan mengelola usahanya dengan luas garapan kecil dan terpecah serta kepemilikan modal yang rendah. Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan penguatan kelembagaan lewat kelompok tani karena dengan berkelompok maka petani tersebut akan lebih kuat, baik dari segi kelebagaannya maupun permodalannya.

Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Desa Mano perlu adanya perhatian yang serius dari instansi pemerintah, karena selama ini pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat pesisir hanya sebatas pembentukan kelompok petani rumput laut. Pada tahun 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan membentuk 1 kelompok masyarakat petani rumput laut dengan nama Kelapa Pende, di tahun 2013 pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan membentuk 3 (tiga) kelompok petani rumput laut yang terdiri dari kelompok:

1. Petani Lawara Jaya,
2. Lestari Bahari Jaya dan
3. Mano Jaya III

Setelah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pembentukan kelompok petani rumput laut, tidak ada lagi kegiatan tindak lanjut program untuk kegiatan pemberdayaan seperti; sosialisasi, pelatihan, pembinaan ataupun pemberian bantuan alat produksi kepada petani rumput laut di Desa Mano. Padahal, masyarakat petani rumput laut sangat membutuhkan sentuhan pemberdayaan dari

pemerintah daerah, dengan harapan dapat memberikan pengetahuan bagi petani rumput laut guna peningkatan kesejahteraan.

Pada tahun 2014, pihak dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Halmahera Selatan membentuk lagi 7 (tujuh) kelompok petani rumput laut di Desa Mano yang terdiri dari :

1. Kelompok petani Jaya Bakti,
2. Lawara Jaya II,
3. Sinar Mas,
4. Mano Berkarya,
5. Dobu-Dobu Jaya,
6. Usaha Jadi dan
7. Sinar Bahari Mandiri.

Setelah pembentukan kelompok petani rumput laut tersebut, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Halmahera Selatan memberikan bantuan alat produksi berupa pelompong sebanyak 192 unit untuk dibagikan kepada 5 (lima) kelompok petani rumput laut yang ada di Desa Mano. Pembagian bantuan alat produksi sesungguhnya belum sepenuhnya dirasakan oleh sebagian kelompok petani rumput laut lainnya, hal tersebut karena terbatasnya bantuan yang diberikan.

Selanjutnya di Tahun 2015 bantuan peralatan alat produksi berupa tempat penjumlahan rumput laut sebanyak 16 Unit untuk 2 (dua) kelompok petani sekaligus pembentukan kelompok petani rumput laut lagi dengan jumlah 8 (delapan) kelompok terdiri dari :

1. Karya Bahari Mandiri,
2. Pasir Panjang Tanjung,
3. Bina Bahari,
4. Karya Bahari,

5. Paniki,
6. Karya Mano,
7. Usaha Jaya dan
8. Mawar Bahari.

Dengan demikian jumlah kelompok masyarakat petani rumput laut yang ada di Desa Mano sudah berjumlah 19 (sembilan belas) kelompok. Tentu pembentuk kelompok tersebut memiliki tujuan yang hendak dicapai yakni agar usaha para petani rumput laut dapat berkembang dan meningkatkan taraf kesejahteraan dari aspek ekonomi masyarakat petani rumput laut.

Akan tetapi, kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan belum memberikan manfaat yang baik bagi petani rumput laut yang ada di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan. Ini dikarenakan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan hanya sebatas pembentukan kelompok tani dan pemberian alat/sarana produksi yang dinilai terlalu sedikit. Semestinya kegiatan pemberdayaan masyarakat petani rumput laut lebih mengarah pada :

1. Memberikan pelatihan dan penyuluhan serta pendampingan pada masyarakat,
2. Peningkatan peran pemerintah melalui pemberdayaan petani rumput laut,
3. Pemberian bantuan sarana produksi yang lebih banyak sesuai kebutuhan kelompok tani rumput laut,
4. Pembinaan manajemen usaha melalui peningkatan kemitraan antara lembaga keuangan dengan petani rumput laut, sehingga dari sisi pendanaan masyarakat petani rumput laut dapat meminjam dana dari mitra kerja yang telah ditentukan, serta

5. Pengembangan sumberdaya manusia bagi masyarakat petani rumput laut.

C. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut

Secara mendasar salah satu tugas dan kewajiban bagi pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia karena secara tegas telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik secara perencana, penggerak, pengendali, dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Kegagalan dan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat dalam proses pengembangan masyarakat untuk memahami realitas masyarakat. Pentingnya pembangunan dan pemberdayaan ini merupakan mekanisme pembangunan nasional yang menjadikan masyarakat pada akhirnya berperan sebagai pelaku utama kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan tindak lanjut, untuk itulah diperlukan payung hukum bagi penyelenggaraan sistem pembangunan nasional yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan spirit kebangsaan Indonesia yang tidak hanya dapat menjembatani konteks mikro ke dalam konteks makro tetapi juga sebaliknya menerjemahkan konteks makro ke dalam konteks mikro. Pentingnya memberikan mandat

tentang keberpihakan pemerintah sebagai fasilitator dalam pembangunan nasional yang memberikan peran aktif kepada masyarakat partisipatif.

Pemberdayaan adalah upaya membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Jadi konsep pemberdayaan dalam implementasinya perlu keterpaduan antara kehendak pemerintah dan para Stake Holders melalui program-program dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga sasaran pembangunan menjadi terarah dan tepat guna (Mubyarto, 2000).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

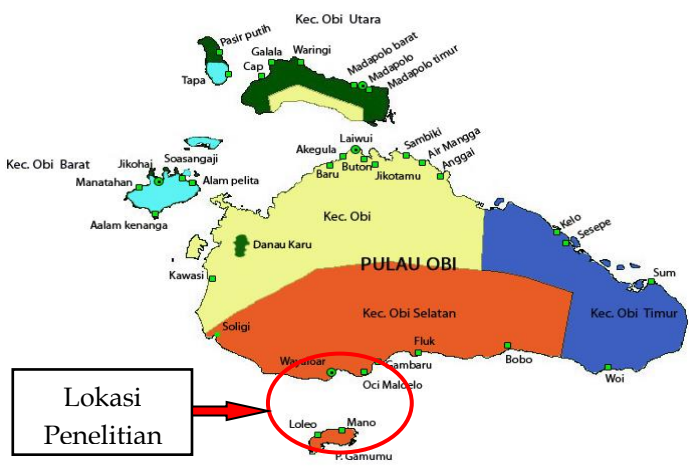
Pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa untuk memperkuat diri dan kelompok mereka dalam berbagai hal, mulai dari soal kelembagaan, kepemimpinan, sosial ekonomi, dan politik dengan menggunakan basis kebudayaan mereka sendiri. Pada

proses pemberdayaan, ada dua prinsip dasar yang harus dipedomani (Saptana, *dkk*, 2003) yaitu :

1. Menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri.
2. Mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

Komoditas rumput laut merupakan salah satu sumber akselerasi pertumbuhan sektor pertanian karena sifat permintaannya yang elastis terhadap pendapatan. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan peningkatan pendapatan dan berkembangnya pusat-pusat industri merupakan faktor potensial bagi peningkatan permintaan produk rumput laut. Melalui banyak permintaan produk rumput laut dari pihak perusahaan, sehingga menuntut masyarakat petani rumput laut bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan hasil panen yang banyak.

Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di desa Mano Kecamatan Obi Selatan yang sangat berpotensi dalam bidang perikanan budidaya. Posisi budidaya rumput laut terletak di teluk pulau Gamumu, yang dari sisi cuaca dan iklim proses pembudidayaan rumput laut yang dilakukan sebagian masyarakat desa Mano dianggap sangat cocok untuk dilakukan pemeliharaan rumput laut.



Gambar 2 Peta Wilayah Pulau Obi



Gambar 3 Peta Lokasi Kawasan Pengembangan Budidaya Rumput Laut Desa Mano Kec. Obi Selatan

Keterangan

→ = Peta Kawasan Pengembangan Rumput Laut

Berdasarkan jumlah penduduk desa Mano pada tahun 2016 yang berjumlah 2.916 jiwa, dan sekitar 190 masyarakat memilih untuk membudidayakan rumput laut dengan alasan harga rumput laut dipasaran semakin meningkat dengan kata lain kian hari kian mahal harga jualnya. Namun dalam realitasnya pengembangan budidaya rumput laut harganya semakin menurun, harganya di tahun 2015 sekitar Rp. 9.000,-/per kilogram

akan tetapi di tahun 2016 harganya mengalami fluktuatif (naik-turun) di kisaran antara harga Rp. 8.500,- bahkan sampai pada harga Rp. 7.000,-/per kilogram.

Fluktuatif harga pasaran rumput laut tidak mempengaruhi hasil produksi petani rumput laut yang ada di desa Mano. Rata-rata hasil produksi petani rumput laut selama 1 tahun sebanyak 12 ton dan bahkan ada petani rumput laut dalam setahun hasil panen/produksinya mencapai 13 ton. Berikut tabel penjelasan mengenai hasil panen/produksi para petani rumput laut yaitu :

Tabel 8 Jumlah Hasil Panen/Produksi Masyarakat Petani Rumput Laut di Desa Mano

No	Nama Masyarakat Petani Rumput Laut	Hasil Panen selama 1 tahun	Harga Terendah Per-Kg	Total Pendapatan Masyarakat Petani rumput laut/per tahun
1	La Jainu	13 Ton/ 13.000 kg	Rp. 7.000	Rp. 91.000.000,-
2	La Baru Baramuli	12 Ton/ 12.000 kg	Rp. 7.000	Rp. 84.000.000,-

Sumber : Hasil Analisa Data, 2016

Dari data tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa hasil produksi masyarakat petani rumput laut sangat menjanjikan untuk peningkatan taraf hidup mereka menuju kesejahteraan. Hasil panen selama setahun bisa

mencapai 12 ton dan bahkan sampai pada 13 ton/per tahun, waktu musim panen rumput laut per dua bulan sudah panen sehingga dalam setahun petani rumput laut bisa memanen hasilnya 6 (enam) kali/per tahun.

Selain dari permasalahan harga di pasaran, sentuhan pemberdayaan dari pihak pemerintah daerah sangat minim dan sama sekali belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat petani rumput laut di desa Mano. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan hanya datang ke desa Mano untuk membentuk beberapa kelompok tani budidaya rumput laut dan memberikan bantuan alat produksi yang dinilai terlalu sedikit. Padahal pengembangan budidaya perikanan rumput laut ini diharapkan mampu pemberdayaan masyarakat petani rumput laut dan meningkatkan taraf hidup petani rumput laut. Maka dari itu program pemberdayaan masyarakat petani untuk budidaya rumput laut ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Keterlibatan pihak pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani rumput laut melalui berbagai bentuk pemberdayaan petani rumput laut diharapkan pembuat kebijakan dan pembinaan dapat memberikan banyak kontribusi bagi pengembangan budidaya rumput laut yang ada di desa Mano. Namun, selama ini bentuk pemberdayaan yang dilakukan pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan hanya sebatas membentuk kelompok tani budidaya rumput laut dan pemberian bantuan alat produksi yang terbatas. Berikut tabel nama-nama

kelompok masyarakat yang dibentuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu :

Tabel 9 Data Kelompok Masyarakat Petani Rumput Laut Di Desa Mano

No	Nama Kelompok Masyarakat Petani Rumput Laut	Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota	Tahun dibentuk
1	Kelapa Pende	La Eri MB	10 Orang	2011
2	Lawara Jaya	La Jainu	10 Orang	2013
3	Lestari Bahari Jaya	Ali Baba	9 Orang	2013
5	Mano Jaya III	La Sahida	10 Orang	2013
5	Jaya Bakti	La Dahmi	10 Orang	2014
6	Lawara Jaya II	Wa Kabo	10 Orang	2014
7	Sinar Mas	Wa Mariati	10 Orang	2014
8	Mano Berkarya	La Aliko	10 Orang	2014
9	Dobu-Dobu Jaya	La Bantu	10 Orang	2014
10	Usaha Jadi	Oma Ria	10 Orang	2014
11	Sinar Bahari Mandiri	Ida	10 Orang	2014

No	Nama Kelompok Masyarakat Petani Rumput Laut	Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota	Tahun dibentuk
12	Karya Bahari Mandiri	Ernawati	10 Orang	2015
13	Pasir Panjang Tanjung	La Musrin	10 Orang	2015
14	Bina Bahari	La Niu	10 Orang	2015
15	Karya Bahari	La Ahmat	10 Orang	2015
16	Paniki	La Bago	10 Orang	2015
17	Karya Mano	LaOde Marawi	10 Orang	2015
18	Usaha Jaya	La Mula	10 Orang	2015
19	Mawar Bahari	La Resi	10 Orang	2015

Sumber : Ketua Koordinator Penyuluh Pendamping, 2016

**Tabel 10 Bantuan Alat Produksi Masyarakat Petani
Rumput Laut
Di Desa Mano**

No	Jenis Bantuan Alat Pembudidayaan Rumput Laut	Jumlah	Tahun Pemberian Bantuan	Keterangan
1	Pelompong	192 Unit	2014	5 Kelompok
2	Alat Penjemuran	16 Unit	2015	2 Kelompok

Sumber : Hasil Analisa Data, 2016

Dari data tabel 9 dan tabel 10 tersebut di atas, menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan hanya sebatas pembentukan kelompok pelaku utama masyarakat petani rumput laut. Hasil dari pembentukan kelompok tani, sekarang jumlahnya cukup banyak sekitar 19 kelompok masyarakat petani rumput laut, sedangkan dari pemberian alat produksi bagi kelompok masyarakat petani masih terbatas dan cukup sedikit dan tidak berbanding lurus dengan jumlah kelompok masyarakat petani rumput laut di desa Mano. Sedangkan dari pemerintah desa Mano sama sekali belum melaksanakan atau melakukan kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat kelompok tani rumput laut, ini dikarenakan anggaran desa belum dialokasikan untuk pemberdayaan

masyarakat dan hanya terfokus pada kegiatan pembangunan fisik yang ada di desa Mano.

Sisi pengolahan rumput laut di desa Mano Kecamatan Obi Selatan, sebagian besar pengolahan budidaya rumput laut dikelola secara tradisional, hal ini dikarenakan pengolahan modern membutuhkan persyaratan yang sulit dipenuhi para petani rumput laut termasuk di dalamnya kualitas rumput laut yang bermutu tinggi dan teknologi pengelolaanya. Untuk ikut bersaing, industri pengolahan budidaya rumput laut skala kecil ini membutuhkan bantuan modal, pembinaan atau pelatihan serta bantuan pemasaran sehingga rumput laut ini dapat dikembangkan memiliki kualitas daya jual yang tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan pada para petani rumput laut yang berkelanjutan untuk menghasilkan produk budidaya rumput laut yang ditinjau dari segi ekonomis menguntungkan masyarakat petani rumput laut dari segi teknis bisa dilaksanakan, sehingga pengembangan rumput laut ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

BAB 3

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT

Rasid Pora
Abdullah Kaunar

A. Pengantar

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting yang harus dilakukan oleh pemerintah, karena fungsi utama pemerintah yakni menyelenggarakan proses pemberdayaan bagi masyarakat. Sebagai proses, maka tentunya pemberdayaan harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Menurut Teguh (2004:34) mengemukakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar

sehingga dapat menggali peran di dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektif-nya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-ketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan

saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-ketrampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan dilandasi oleh kemampuan masyarakat di dalam membetuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal sebagai fasilitator saja. Sejalan dengan pendapat Sumodiningrat (1998:56) maka masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Disamping itu kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik, dan selanjutnya dapat mebetuk kedewasaan sikap masyarakat.

Petani rumput laut sebagai salah satu pelaku pembangunan kelautan dan perikanan yang memproduksi komoditi ekspor, dan perlu mendapatkan perhatian serta pembinaan secara serius dan berkelanjutan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk dapat menghasilkan produk rumput laut yang dapat bersaing di pasaran perlu manajemen usaha yang profesional. Hal ini dapat terwujud kalau usaha rumput

laut dijalankan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas mengingat komoditi ini rentan terhadap kualitas dan pemasaran.

Berdasarkan temuan data selama ini, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan budidaya rumput laut di Desa Mano, faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Kurangnya pemasaran hasil panen rumput laut,
2. Minimnya modal usaha untuk pengembangan budidaya rumput laut, dan
3. Tidak adanya pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat petani.

B. Kurangnya Pemasaran Hasil Panen Rumput Laut

Pemasaran adalah salah satu kegiatan terpenting guna untuk memasarkan suatu produk. Setiap perusahaan akan melakukan pemasaran dengan cara dan konsep yang berbeda-beda guna untuk menarik perhatian khalayak umum. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pemasaran seperti, Saladin (2007) pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Pengertian Pemasaran Menurut Philip dan Duncan (2007) pemasaran yaitu sesuatu yang meliputi semua langkah yang dipakai atau dibutuhkan untuk menempatkan barang yang bersifat tangible ke tangan konsumen. Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009) mengenai pemasaran (marketing) adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu

definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah “memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan”.

Pemasaran suatu produk atau jasa merupakan hal yang penting guna untuk menarik perhatian khalayak umum terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Namun sebelum memulai untuk melakukan kegiatan pemasaran, perusahaan perlu mengetahui konsep inti dalam pemasaran, agar kegiatan pemasaran menjadi lebih berguna bagi perusahaan maupun bagi khalayak umum.

Menurut Kotler dan Keller (2009), konsep inti dalam kegiatan pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Kebutuhan manusia tidak ada habis-habisnya. Semakin bertambah usia, semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia yang sangat vital adalah, udara, makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal untuk dapat bertahan hidup. Orang juga memiliki kebutuhan yang kuat akan rekreasi, pendidikan, dan hiburan. Kebutuhan-kebutuhan ini akan menjadi keinginan ketika diarahkan ke objek tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Permintaan adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar atau daya beli manusia. Oleh karena itu suatu perusahaan harus membuat suatu produk atau jasa berdasarkan pada kebutuhan konsumen, keinginan konsumen, serta permintaan konsumen, sehingga pada saat melakukan kegiatan pemasaran, produk tersebut akan lebih mudah mendapatkan kesan dihati konsumen.

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan perusahaan untuk meningkatkan

usaha dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Disamping kegiatan pemasaran perusahaan juga perlu mengkombinasikan fungsi-fungsi dan menggunakan keahlian mereka agar perusahaan berjalan dengan baik.

Dalam hal ini perlu diketahui beberapa definisi pemasaran. Menurut Kotler "Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain" (1997:8). Sedang definisi menurut William J. Stanton, (1984:7) yaitu: "Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial". Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Basu dan Hani 2004:4).

Konsep pemasaran merupakan falsafah perusahaan yang menyatakan bahwa keinginan pembeli adalah syarat utama bagi kelangsungan hidup perusahaan. Konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen. Definisi konsep pemasaran menurut Basu Swastha (2002:17) "Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan

kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomis dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan”.

Makna pemasaran dalam kehidupan ekonomi memang sangat berarti bagi keberlanjutan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen/masyarakat. Akan tetapi, terkadang makna tersebut tidak memiliki arti jikalau dalam kehidupan suatu komunitas tidak dapat memasarkan hasil usahanya. Hal ini dikarenakan petani kesulitan menjual hasil panennya karena tidak punya jalur pemasaran sendiri, akibatnya petani menggunakan sistim tebang jual. Artinya bahwa petani rumput jikalau sudah memanen hasil rumput laut langsung di jual kepada pembeli (tengkulak) yang ada di desa. Kalau tidak dijual, maka dapat mempengaruhi hasil panennya karena sudah mengalami kekurangan berat. Dengan sistim ini sebanyak 40 % dari hasil penjualan panen menjadi milik tengkulak.

Menurut Branson dan Douglas (1983), lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. Hasil panen budidaya oleh para petani/nelayan, dijual dalam bentuk rumput laut kering, setelah dijemur selama 3 sampai 4 hari. Rumput Laut Kering dimasukkan ke dalam karung-karung plastik untuk dijual kepada para pedagang pengumpul/pegepul yang kemudian menjualnya kepada pihak pengusaha/pabrik pengolahan rumput laut di beberapa kota yaitu Kota Ternate dan Kota Bitung. Para pengumpul/pegepul membeli rumput laut kering di desa Mano dari petani rumput laut dengan harga sekitar Rp. 7.000,- per kilogram.

Pemasaran atau orang beli (pembeli) untuk hasil panen rumput laut di Desa Mano masih kurang, ada sebagian masyarakat petani rumput laut menjualnya di Kota Ternate ada juga masyarakat petani rumput laut menjualnya di Bitung. Di Desa Mano ada juga pembeli, yaitu Waliati dan La Adiman tapi harganya tidak sama dengan di wilayah Kota. Pembeli yang ada di Desa Mano membayarnya dengan harga Rp. 7.000/per kilogram, sedangkan pada wilayah Kota Ternate dan Kota Bitung harga rumput laut disekitaran Rp. 10.000,- sampai Rp. 12.000,-/per kilogram. Kondisi yang dialami masyarakat petani rumput laut sangat memprihatikan sehingga hasil panen harus di jual di Desa, kalau mau jual di Ternate atau Bitung harus mempertimbangkan biaya transportasi kapal dan buruh waktu sampai di kota. Jadi banyak masyarakat petani rumput laut menjual hasil panennya di desa walaupun harga di bawa standar Kota.

Kurangnya pemasaran dari luar desa Mano sehingga masyarakat kelompok tani rumput laut memilih menjual hasil panennya langsung kepada pengepul di desa Mano. Hal ini perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan agar mencarikan solusi dengan mendatangkan para pengusaha untuk membeli hasil panen rumput laut yang ada di desa Mano dengan nilai yang tinggi sehingga keberlanjutan dari masyarakat kelompok tani tetap eksis dan mempertahankan hasil komoditasnya dengan baik.

C. Minimnya Modal Usaha untuk Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Listyawan Ardi Nugraha (2011:9) “modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar (Amirullah, 2005:7).

Prinsipnya ada beberapa macam-macam model yakni model sendiri, modal asing (pinjaman) dan modal patungan. Menurut Mardiyatmo (2008) mengatakan bahwa modal sendiri adalah modal yang diperleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya. Kelebihan modal sendiri adalah:

1. Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan;
2. Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal;

3. Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama;
4. Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.

Kekurangan modal sendiri adalah:

1. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas;
2. Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya ;
3. Kurang motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari:

1. Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun pemerintah atau perbankan asing;
2. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal ventura, asuransi leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya;

3. Pinjaman dari perusahaan non keuangan.

Kelebihan modal pinjaman adalah:

1. Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Selama dana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki prospek cerah;
2. Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi, ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga berusaha menjaga image dan kepercayaan perusahaan yang memberi pinjaman agar tidak tercemar.

Kekurangan modal pinjaman adalah:

1. Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai berbagai kewajiban untuk membayar jasa seperti: bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, materai dan asuransi;
2. Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung;
3. Beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar (Kasmir, 2007:91).

Selain modal sendiri atau pinjaman, juga bisa menggunakan modal usaha dengan cara berbagai kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan modal satu orang teman atau beberapa orang (yang berperan sebagai mitra usaha) (Jackie Ambadar, 2010:15).

Pada umumnya para petani nelayan memulai usaha budidaya rumput laut ini kekurangan modal, dalam prakteknya para petani nelayan ini banyak kemudian yang terikat kepada pedagang pengumpul yang bersedia memberikan modal dan keperluan keluarga sehari-hari sebelum panen. Dalam setiap usaha, modal usaha sangat besar peranannya dalam meningkatkan pendapatan atau keuntungan (profit) usaha. Hal ini ditegaskan oleh Korompis, (2005:91) bahwa diantara sejumlah komponen utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang dengan efektif, salah satunya adalah modal kerja; selain teknologi tepat guna; model manajemen usaha; pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi dan manajemen usaha; ethos kerja, semangat dan disiplin kerja. Artinya bahwa tanpa modal usaha yang memadai, setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses usahanya, baik memproduksi barang-barang maupun melakukan transaksi jual-beli barang, karena hal demikian tidak mungkin dilakukan tanpa adanya modal usaha.

Pada satu sisi, walaupun suatu usaha telah memiliki modal sendiri namun jumlahnya terbatas, maka akan mengalami pula kesulitan untuk mengembangkan usahanya sehingga kurang berpeluang untuk bersaing

serta memperoleh pendapatan atau keuntungan yang memadai; dan di sisi lain, bahwa walaupun ada modal yang cukup, namun tidak dikelola secara baik, efisien dan efektif, akan menimbulkan pemborosan bahkan mengalami kerugian dalam berusaha. Dengan demikian pemberian modal kerja (modal untuk berusaha) akan dapat mendorong pengembangan usaha anggota kelompok sehingga dapat meningkatkan pendapatan (Korompis, 2005:93).

Gambaran masyarakat petani rumput laut di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan, rata-rata petani mayoritas mengeluh kekurangan modal sehingga usaha mereka sangat sulit untuk berkembang dan banyak dari mereka justru terlilit hutang pada orang-orang kaya yang ada di desa, dan bahkan orang kaya tersebut menerapkan suku bunga yang sangat tinggi bahkan melebihi tingkat bunga komersial yang ditetapkan oleh Bank-Bank pemerintah. Alasan mereka pinjam bervariasi selain digunakan memenuhi kebutuhan konsumtif juga untuk modal usaha.

Dengan terbentuknya kelompok tani rumput laut ini maka petani melalui kelompok dapat mengajukan permohonan kredit kepada pemerintah, suntikan dana dari pemerintah ini untuk keperluan usaha dengan satu harapan usaha budidaya rumput lautnya akan semakin berkembang. Sedang harapan lainnya dari petani rumput laut yakni adanya perhatian yang serius dari pemerintah untuk atasi persoalan ini melalui kucuran atau bantuan dana hibah. Namun semua itu tidak ada artinya bagi kelompok tani rumput laut yang ada di desa Mano Kecamatan Obi Selatan, mereka tidak diberikan modal usaha budidaya dari pihak pemerintah dan bahkan

mereka sendirilah yang melakukan peminjaman terhadap orang kaya yang ada di desa.

Masyarakat petani rumput laut di Desa Mano memiliki pinjaman di pengepul, dengan ketentuan hasil panen dijual baru potong sesuai utang yang ambil. Untuk jumlahnya bervariasi, ada petani rumput laut yang meminjam Rp. 3.000.000,-, Rp. 5.000.000,- dan bahkan ada yang meminjam sampai Rp. 7.000.000,-. Uang itu untuk modal usaha membeli peralatan budidaya seperti tali, bibit, dan keperluan rumah tangga. Sedangkan untuk modal usaha dari pemerintah daerah atau pemerintah desa sama sekali tidak diberikan sepersen pun. Makanya ada masyarakat petani rumput laut sampai meminjam di pengepul (Waliati) untuk modal usaha pengembangan budidaya rumput laut. Biasanya modal usaha itu dibelikan tali, pelompong, penjemuran dan bibit rumput laut. Pinjaman modal tersebut harus cepat ganti oleh masyarakat petani rumput laut dan hasil panen rumput laut juga harus jual ke pengepul (Waliati) dan tidak boleh di jual ke tempat lainnya.

Modal usaha yang terbatas dalam pengembangan budidaya rumput laut, memaksa para masyarakat petani rumput laut meminjam modal kepada pengepul yang ada di Desa Mano. Dalam meminjam modal usaha kepada para petani rumput laut, pengepul menentukan berbagai aturan antara lain :

1. Para petani rumput laut diharuskan menjual hasil panennya terhadap pengepul dan tidak boleh menjual ke tempat lain,
2. Hasil panen yang dijual kepada pengepul, pengepul langsung mengambil jumlah modal usaha yang

dipinjam para petani setelah hasil panennya di timbang, dan

3. Batas pengembalian modal usaha yang di pinjam paling lama 6 bulan atau 2 kali panen hasil budidaya rumput laut.

D. Tidak Adanya Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Masyarakat Petani

Rumput laut merupakan salah satu kekayaan laut yang dapat dikembangkan dan menjadi komoditi yang berharga dan memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu cara budidaya rumput laut dan cara pengolahannya menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kemajuan budidaya rumput laut serta membantu para petani agar mendapatkan ketrampilan teknik budidaya rumput laut yang baik guna mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk dapat menghasilkan budidaya rumput laut yang baik, maka tentunya harus adanya kegiatan pelatihan atau penyuluhan dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan.

Pelatihan tidak terlepas kaitannya dengan konsep manajemen sumber daya manusia, sementara manajemen sumber daya manusia itu sendiri adalah bagaimana mengatur atau mengelola manusia sebagai salah satu unsur utama manajemen yang meliputi : kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menempatkan, menggerakkan, mengendalikan/ mengontrol dan mengevaluasi aktivitas manusia dalam proses pencapaian tujuan. Artinya bahwa jika kita ingin agar manusia mengoptimalkan produktivitasnya, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu

dikembangkan/ditingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan/keterampilan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dilakukan manusia itu sendiri (Korompis, 2005:87).

Selanjutnya Menurut Korompis, (2005:84), agar manusia mengoptimalkan produktivitasnya, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu dikembangkan/ ditingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan/keterampilan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dilakukan manusia itu sendiri.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Kelurahan dijelaskan bahwa “Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Pelatihan PMD, adalah upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri”. Pelatihan Berbasis Komunitas adalah pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan setiap kelompok masyarakat dan individu dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selanjutnya, dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 dijelaskan juga bahwa untuk Rumpun pelatihan usaha ekonomi masyarakat terdiri dari bidang pelatihan:

1. Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
2. Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
3. Pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
4. Pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; dan
5. Pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat

Pasal 19 yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa proses pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dilakukan secara:

1. Interaktif;
2. Inspiratif;
3. Menarik;
4. Menantang; dan
5. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis peserta pelatihan.

Dalam proses pelatihan, pelatih/fasilitator memberikan keteladanan dan mampu memotivasi peserta untuk berpartisipasi. Dalam proses pelatihan, peserta pelatihan berpartisipasi aktif, memiliki motivasi, belajar membelajarkan, dan pengembangan budaya etos kerja. Pelatih/fasilitator pelatihan PMD dapat berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Pelatih/Fasilitator adalah orang atau kelompok orang yang mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui pelatihan kepada aparatur

penyelenggara Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta masyarakat.

Pelatihan dan penyuluhan dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, sikap dan ketrampilan masyarakat petani rumput laut dalam mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan semestinya langsung pada materi pembudidayaan rumput laut yang baik sehingga hasil produksinya memuaskan, akan tetapi kegiatan atau penyuluhan sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Penyuluh Pendamping Wilayah Kecamatan Obi Selatan. Masyarakat petani rumput laut dalam melakukan budidaya rumput laut sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki dan tidak ada pelatihan atau penyuluhan terkait pembudidayaan rumput yang semestinya dilakukan supaya hasil produksinya berkualitas.

Pada prinsipnya bahwa pelatihan/penyuluhan itu penting, supaya meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kelompok tani mengenai cara-cara pembudidayaan rumput laut yang baik. Tapi selama ini kegiatan penyuluhan belum dilaksanakan, karna terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Semestinya pelatihan/penyuluhan lebih diarahkan pada :

1. Pemilihan lokasi budidaya,
2. Memilih bibit yang baik,
3. Tata cara penanaman bibit,
4. Pemeliharaannya,
5. Waktu panen, dan
6. Metode budidaya rumput laut

Berdasarkan gambaran tersebut, selama ini dari penyuluh pedamping dalam wilayah Kecamatan Obi

Selatan belum pernah melaksanakan pelatihan atau penyuluhan kepada kelompok masyarakat petani rumput laut di Desa Mano. Padahal kegiatan pelatihan atau penyuluhan sangat bermanfaat bagi masyarakat petani rumput, baik untuk peningkatan kapasitas mereka juga meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara dalam pembudidayaan rumput laut.

Menurut Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, menjelaskan ada beberapa tahap-tahapan yang harus dilakukan dalam pembudidayaan rumput :

1. Pemilihan lokasi budidaya

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi budaya rumput laut adalah :

- a. Terlindung, aman dari pencurian, dekan jalan, bebas pencemaran dan mudah mendapatkan tenaga kerja, dan
- b. Tersedia sumber bibit, suhur air 20-28°C, kecepatan arus 20-40 cm/detik, salinitas 28-34 %, kecerahan > 1,5 m, kedalaman air untuk metode lepas dasar 30-60 cm dan 1-,15 cm untuk metode apung.

2. Bibit

a. Persyaratan Kuantitatif

- 1) Umur 25-30 hari
- 2) Bercabang banyak dan rimbun minimal 3 thallus
- 3) Diameter thallus utama minimal 0,5 cm
- 4) Berat bibit awal 50-100 gram

b. Persyaratan Kualitatif

- 1) Warna cerah dan segar
- 2) Bersih dari kotoran dan organism penempel
- 3) Bebas penyakit

- 4) Thallus tidak luka
- 5) Bertunas runcing
- 6) Pemotongan bibit menggunakan pisau

3. Tata Cara Penanaman Bibit

Penanaman diawali dengan mengikat rumput laut (bibit) ke tali jalur yang telah dilengkapi dengan tali pengikat rumput. Pengikatan dilakukan di lokasi yang terlindung dari sinar matahari langsung. Berat bibit yang ditanam 50-100 gram per ikatan. Jarak tanam untuk metode rakit dan metode jalur 30-35 cm, sedangkan untuk metode long line 50-100 cm. Setelah selesai mengikat rumput laut, tali jalur yang berisi rumput tersebut diikatkan pada kerangka yang telah tersedia.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan dapat dilakukan melalui pengontrolan. Pengontrolan dilakukan untuk membersihkan tanaman pengganggu dan penyulaman tanaman yang terlepas. Pengontrolan dilakukan minimal 2 kali dalam seminggu

5. Waktu Panen

a. Umur

Rumput laut yang digunakan sebagai bibit, pemanenan dilakukan setelah berumur 25-30 hari. Sedangkan untuk dikeringkan, pemanenan dilakukan pada umur 1,5 bulan atau lebih karena kandungan karaginan cukup tersedia.

b. Cuaca

Pemanenan dan penjemuran dilakukan pada cuaca cerah supaya mutu dari rumput laut tersebut terjamin.

c. Cara Panen

Rumput laut diangkut ke tepi pantai kemudian dirontokan dengan jalan memasang dua patok kayu dalam satu lubang, kedua ujung patok atas direntangkan sehingga membentuk huruf Y. Setelah itu dua sampai tiga ujung dari tali jalur yang berisikan rumput laut hasil panen tersebut dimasukkan ke antara kedua patok tersebut dan ditarik sehingga rumput laut rontok dan siap dijemur. Penjemuran memerlukan waktu 2-4 hari.

6. Metode Budidaya Rumput Laut

Ada beberapa metode yang sering dilakukan dalam kegiatan budidaya rumput laut, antara lain :

- a. Metode Lepas Dasar
- b. Metode Rakit Apung
- c. Metode Single Long Line
- d. Metode Multiple Long Line (Berbingkai)
- e. Metode Jalur/Metode Kombinasi

E. Kesimpulan

1. Pembentukan kelompok masyarakat petani rumput laut merupakan bagian dari bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga kelompok masyarakat petani rumput laut di desa Mano berjumlah 19 kelompok yang dibentuk sejak tahun 2011 sampai 2015.
2. Pemberian bantuan alat produksi juga bagian dari bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan, namun pemberian bantuan dimaksud hanya

terbatas dan dinilai terlalu sedikit. Bantuan alat produksi berupa pelompong sebanyak 192 unit untuk 5 kelompok saja dan alat penjemuran sebanyak 16 unit untuk 2 kelompok, dan kelompok lainnya tidak mendapatkan bantuan alat produksi.

3. Faktor-faktor penghambat masyarakat petani dalam pengembangan budidaya rumput antara lain :
 - a. Kurangnya pemasaran hasil panen rumput laut,
 - b. Minimnya modal usaha untuk pengembangan budidaya rumput laut, dan
 - c. Tidak adanya pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2008, Intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Rajawali Pers. Jakarta.
- Anggadiredja, 2006. Manfaat Rumput Laut. Jakarta: Usaha Nasional.
- Amirullah, Pengantar Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Ardi Nugroho, Listyawan. 2011. Pengaruh Modal Usaha. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ambadar,Jacky et. Al. 2010. Membentuk Karakter Pengusaha. Jakarta Selatan: Kaifa
- Basu Swastha.2002.Manajemen Pemasaran. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Penerbit Liberty
- Basu Swastha Dharmamesta dan T. Hani Handoko. 2004. Manajemen Pemasaran Perilaku Konsumen. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Liberty
- Cholisin, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011
- Depdiknas, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.
- Elizabeth, R., 2007. Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

- Fadholi Hernanto. 1989. Ilmu Usahatani. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1995. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat", dalam Bestari, Nomor 20 tahun VIII Agustus-Desember 1995
- Kasmir. 2007. Manajemen Perbankan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kotler, K. (2009). Manajemen Pemasaran 1. Edisi ketiga belas. Jakarta: Erlangga
- Korompis, Fransiska R. 2005. Pemberdayaan Sektor Informal : Studi tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Kontribusinya terhadap Penerimaan PAD di Kota Manado. Tesis. Program Pascasarjana Iniversitas Sam ratulangi. Tidak dipublikasikan
- LA SUHU, Bakri; IP, S. *PEMEKARAN DAERAH: PRO-KONTRA DAN KONSPIRASI (Studi Tentang Konfigurasi Elit dalam Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Halmahera Selatan-Maluku Utara)*. 2011. PhD Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- LA SUHU, Bakri, et al. Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku.
- LA SUHU, Bakri, et al. Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 2019, 5.2: 347-362.
- LA SUHU, Bakri. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI

WILAYAH PESISIR KOTA TIDORE KEPULAUAN
(Studi Di Desa Maitara Kecamatan Tidore
Utara). *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-
JGOA*, 2020, 1.1: 17-24.

LA SUHU, Bakri; IBRAHIM, Abdul Halil Hi. *Konspirasi Elit
Dibalik Pemekaran Daerah*. 2022.

Mardiyatmo. 2008. *Kewirausahaan*. Surakarta: Yudhistira

Mubyarto. 1998. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan
Peranan Ilmu-ilmu Sosial*. Yayasan Argo-Ekonomi.
Jakarta.

_____, 2000. *Nelayan dan Kemiskinan*. Rajawali
Press. Jakarta

Moleong J. Lexy, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja
Rosda Karya, Bandung

Nataniel, E. 2008. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir*. Ambon: GeMMA Press.

Nikijuluw, V. P. H. 2001. *Populasi dan Sosial Ekonomi
Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan
Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir Secara Terpadu (Makalah)*.

Parsons, Ruth J., 1994, James D. Jorgensen, Santos H.
Hernandez, *The Integration of Social Work Practice*.
Wadsworth, Inc., California.

Payne, M., 1997. *Modern Social Work Theory*. Second
Edition. McMillan Press Ltd. London.

Pattiasina, J. R. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Nelayan*, Tesis Sekolah Pasca Sarjana IPB, Bogor.

- Riyadi, dkk. 2003. Kebijakan, Perencanaan Pembangunan nasional Bidang Sumberdaya Laut dan Pesisir Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Era Otonomi Daerah. Menteri Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Jakarta. Tanggal 26 Februari. 2003.
- Suharto, Edi, 2004, Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi kasus rumah Tangga Miskin di Indonesia, Bandung: STKSPres.
- Saladin, H. Djaslim, SE., 2007, Intisari Pemasaran & Unsur-unsur Pemasaran, Edisi Keempat, Linda Karya, Bandung.
- Satria, Arif. 2002. Sosiologi masyarakat pesisir. Jakarta Selatan (ID): Cidesindo.
- _____ 2009. Pesisir dan laut untuk rakyat. Bogor (ID): IPB Press.
- Suhendra, K. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sumodiningrat, G. 1999, Membangun Perekonomian Rakyat, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sanapiah, Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, PT. Rajawali Pres Jakarta, 2001
- Sadikin M, 2001. Pengembangan Sektor Pertanian (Penanganan Komoditi Unggul). Jakarta. UGM Press.
- Slamet, 2000. Agrikultur. Bogor. LPN-IPB.
- Suyatno Bagong, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Toeri dan Praktek, Grafika, Jakarta

- Sutomo, 2006. Rumput Laut. Jakarta: Pita Merah.
- Saptana, T; Pranadji; Syahyuti *dan* Roosganda, E.M., 2003. Transformasi Kelembagaan untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan. Laporan Penelitian. PSE. Bogor.
- Sumodiningrat, G, 1998, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, PT. Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Teguh, Ambar S, 2004, Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta
- Taylor,DRF,dan Mc Kenzie,1992, Development from Wihins Routledge Chapter 1 dan 2,London
- www.kp3k.dkp.go.id, 2016. PNPM Mandiri Menyentuh Nelayan. Akses pada tanggal 06 September, 2016.
- <http://duniaplant.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-definisi-dan-manfaat-rumput.html>, diakses tgl 08 September 2016
- <https://alamendah.org/2014/08/16/jenis-dan-manfaat-rumput-laut-di-indonesia/> diakses tgl 08 September 2016

TENTANG PENULIS

Penulis 1



Bakri La Suhu, S.IP, M.A, Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate Tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdikan sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menikah dengan Ida Kene, Amd.Keb dan dikaruniai tiga orang anak (Muhammad Fadlan B. La Suhu, Citria Vidia Putri Hi. La Suhu dan Muhammad Zhafran Hi. La Suhu).

Beberapa artikel tulisan yang pernah di public baik jurnal Internasional terindeks Schopus yakni; *Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party* (2018), *Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku*

(2018). Sedangkan pada jurnal nasional yakni; Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara (2019), Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan, (2019), REFUGEE AND LAND DISPUTE (A Case Study at Gamsungi and Tosoa Villages, South Ibu District, Regency of West Halmahera, Year 2015) (2019), SOCIAL CONFLICTS IN CHURCH DEVELOPMENT IN KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Study of Conflict Resolution among Citizens in Church Development In Adu Village) (2019), Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara (2020), Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan (2020), Covid-19 Dan Ancaman Keselamatan Warga Negara (2021), Benang Kusut BLT Dana Desa Tahun 2020 di Pulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (Studi tentang Implementasi Pembagian BLT-DD di Desa Mano) (2021), FEKTIVITAS KERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BERAS BAGI MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) TAHUN 2016 (Studi Di Desa Gam Ici Kecamatan Ibu) (2021), Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (2022), Peran Lurah Dalam Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) Tahun 2017 DI Pulau Ternate (Studi Kantor Lurah Soa Kecamatan Ternate Utara) (2022), Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Talagamori Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan (2022), dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 Di Desa

Dama Kecamatan Loloda Kepulauan (2022). Article tersebut dapat ditelusuri pada google scholar ID QZOnpycAAAAJ, Sinta ID 6096386 dan Scopus ID 57205478258 serta Garuda 1029082.

Buku yang pernah penulis tulis yakni “KONFLIK PEREBUTAN RUANG HIDUP (Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus) tahun 2021”, “KONSPIRASI ELIT Dibalik PEMEKARAN DAERAH” tahun 2022, “SENGKETA TAPAL BATAS di TANAH KESULTANAN” tahun 2022, “BATAS DAERAH Dalam PUSARAN KONFLIK” tahun 2022, GRAND DESIGN PELAYANAN KEPOLISIAN di WILAYAH KEPULAUAN” tahun 2022 dan “POTRET BURAM PEMERINTAHAN : Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik” tahun 2022, serta “Konflik Sengketa Tanah Bandara Di Wilayah Tarakani” tahun 2022.

Penulis 2



Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim Tjan, M.Si Lahir di Tobelo, 10 Agustus 1972, Anak Ke-9 dari 11 bersaudara, Ayahnya Hi. Ibrahim Tjan Bin Hi. Abdullah Tjan Hoat Seng, Ibunya Bernama Tjili Muhammad Said Tjan. Menyelesaikan Pendidikan S1 di IAIN Alauddin Ujung Pandang di Ternate (Thn 1996), S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama (USG) Jakarta (Thn 2002) dan memperoleh gelar Doktor (Dr) Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama (USG) Jakarta (Thn 2017).

Mengabdikan Diri di amal usaha Muhammadiyah yakni sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas

Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate sejak tahun 2003 sampai sekarang, dan sebagai Dosen Pascasarjana UMMU, adapun jabatan yang pernah dijalani : Ketua Program Studi Ilmu Politik, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dekan FISIP UMMU (2006-2010), Ketua Penjaminan Mutu FISIP UMMU, Ketua Tim Penyusunan Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2018), Direktur Program Pascasarjana UMMU (2018-2022), Direktur Pusat Studi Pemerintahan daerah (PSPD) FISIP UMMU dan sekarang diamanahkan sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Riset, Pengabdian, Publikasi dan HAKI Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Masa Jabatan 2022-2026., Menikah dengan Rusmiyanti Masuku, SKM dan dikaruniai empat orang anak, Yaitu : Gibran Chalil Tjan (2004), Ghadiza Chalil Tjan (2006), Ghifar Chalil Tjan (2010) dan Gherhana Chalil Tjan (2015)

Penulis juga mempunyai sejumlah pengalaman, diantaranya : Anggota Tim Pembahasan Penyerahan sebagian Kewenangan Walikota Ternate pada Pemerintah Kecamatan (2005), Sebagai Sekretaris TIM Pendiri Pascasarjana (S2) UMMU Tahun 2007, Menjadi Nara Sumber pada Kegiatan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara tahun 2010, Tim Ahli Penyusunan Naskah RPJMD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, Menjadi Tim Seleksi KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, Ketua FKDM Kota Ternate Tahun 2015, Tim Kajian Harmonisasi Ranperda inisiatif DPRD Kota Ternate (2017), Ketua TIM Pembuatan Naskah Akademik PERDA disejumlah Kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Tenaga Ahli dan Nara sumber Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Ternate Tahun 2019, Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate Tahun 2019, TIM Peneliti di BAPPELITBANGDA

Kota Ternate, Penelitian tentang Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2019, Tim Ahli Penyusunan Naskah RPJMD Pemerintah Kota Ternate, Mengikuti Training Of Trainer (TOT) Persiapan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Oleh KPK RI dan LLDIKTI Wil XII Tahun 2019, Asesor Penilaian Beban Kerja Dosen Dalam Lingkungan LLDIKTI Wilayah XII, Nara sumber pada berbagai seminar dan kegiatan Pemerintahan., Mengikuti Leadership Training Nasional Pimpinan PTM Angkatan Ke-3 Yogyakarta Tahun 2019, Ketua TIM Kajian Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, Panelis Debat Kandidat Bakal Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, Sebagai Penanggungjawab Program Detasering Kemendikbud RI Pada Kegiatan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Perguruan Tinggi dan Rencana Operasional (Renop) Perguruan Tinggi, Khususnya di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate Tahun 2020, Tim Penyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Bisnis Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 2021-2025.

Beberapa Article yang telah di Publis Pada jurnal Internasional terindex Scopus : *Effect Of Public Participation To Improve The Election Commission (KPU) Performance In Ternate City Mayor Election (2018)*, *The Role of Political Parties on Election Commission Performance in 2015 Mayor Election of Ternate City (2018)*, *Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party (2018)*, *Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku (2018)*, *The Implementation Of Policy On Expansion Development Of Employment Opportunities For Productive Workforce In Tidote*

City (2018), Government Performance On Property Tax Services Of Rural And Urban Areas In Ternate City (2018), Jailolo Bay Festival As A Model For Developing Cultural Tourism In West Halmahera (2018), The Performance Of Local Government Company In Tidore City (2018), Policy Implementation On Employee Performance Benefits Of Ternate Election Commission Secretariat (2019), Implementation of Standard Operational Procedures (SOP) Information Dissemination of BMKG Tsunami Early Warning at the Geophysical Statium of Ternate (2021).

Dan Article Jurnal Nasional dan Internasional : *Social Empowerment Of Remote Indigenous Peoples : Study Of Villace Housing Program in Sula District North Maluku, Indonesia (2020), Implementation of Government Regulation Concerning Assignment of Teacher as School Principal (2020), The Effectiveness of Driving License Services in Police Station Traffic Unit (2020), Implementation of Government Regulation No. 53/2010 About Civil State Employees Discipline In General and Equipment of Regional Secretariat Halmahera (2020), The Effectiveness of e-ID Card Services in Sub-District City North Ternate (2021), Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan (2019), Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pencegahan Minuman Keras Di Kota Tidore Kepulauan (Studi Di Kantor Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan) 2020, Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (studi di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula) (2020), Implementasi Program Pemerintah Provinsi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara) (2020), Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Dob) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara (2020), Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan*

Masyarakat (Studi Di Kelurahan Foramadiahi Kecamatan Pulau Ternate) (2020), Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan (2020), Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. (Studi di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah) (2021), Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Di Kabupaten Halmahera Selatan. (Studi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah) (2021), Peran Pemerintah Daerah Dalam Keberlanjutan Penanganan Eceng Gondok Di Danau Duma Kabupaten Halmahera Utara (2022), Peran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dalam Percepatan Pembangunan Jalan Penghubung Antar Kelurahan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan) (2022)

Semua Article yang telah di Publis Pada Jurnal Internasional terindex Scopus , Internasional dan Jurnal nasional tersebut dapat ditelusuri pada google scholar ID iUm3WEwAAAAJ, Sinta ID 6095030 dan Scopus ID 57205387443.

Buku Yang pernah di tulis : Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik, Penerbit : UMMU Press dan Gramasurya Yogyakarta 2019, Implementasi Kebijakan Presisi Kapolri Tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022, Efektifitas Penanganan Praktek Destructive Fishing Di Wilayah Maluku Utara, Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022 Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 50 Tahun 2016 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate, Penerbit : CV. Eureka Media Aksara

Anggota IKAPI Tahun 2022, Efektifitas Koordinasi Antar Stake Holder Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Maluku Utara, , Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022. Sebagai Kontributor Penulis pada Buku Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Melalui Program Detasering, Catatan Pengalaman Detaser di Masa Pandemi Covid-19, Penerbit Insan Cendekia Mandiri 2021.

Sebagai Penyunting Buku : Ternate Bandar Jalur Sutera, Lintas (2001), Negara Hukum dan Good Governance, Ummu Press 2010, Anomali Pendidikan, Kebijakan, Problem & Realita, Ummu Press 2011, Empat Kuliah Hukum Tata Negara (Staadslehre In Ruimere Zin), Ummu Press 2014.

Penulis 3



Vivi Noviyanti S.IP, M.Si, kelahiran 27 April 1988 di Palangkaraya-Kalimantan Tengah, menyelesaikan SD, SMP dan SMU di Palangkaraya. Kuliah S1 di IPDN Jatinangor konsentrasi Manajemen Pembangunan selesai tahun 2009 dan S2 Magister Administrasi Pemerintahan Daerah di Universitas yang sama, dan selesai tahun 2012. Kemudian menyelesaikan S2 Magister Ilmu Administrasi di UMMU Ternate, selesai tahun 2020. Sebelum menjadi dosen Ilmu pemerintahan FISIP di Universitas Muhamamdiyah Maluku Utara, Vivi pernah menjadi PNS Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Tengah. Saat ini bermukim di Kota Ternate dan dosen di Universitas Muhamamdiyah Maluku Utara Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Penulis juga menulis beberapa artikel yang pernah di public pada jurnal nasional, seperti Peran Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Loloda Kepulauan, Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Di Wilayah Pulau Obi (*Studi Kasus Di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara*), Konflik Antar Warga Di Kecamatan Pulau Ternate (*Studi Tentang Negosiasi Tapal Batas Antara Kelurahan Sulamadaha Dan Kelurahan Takome*). Beberapa buku yang pernah penulis tulis yakni “POTRET BURAM PEMERINTAHAN : Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik” tahun 2022, dan PEMIMPIN IDEAL CATATAN UNTUK CALON KEPALA DAERAH Tahun 2023.

Penulis 4



Suridin La Sariha, S.IP, Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan, Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan. Menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2016.

Pada tahun 2017, penulis kembali mengabdikan diri di Desa Mano sebagai Alumni Ilmu Pemerintahan untuk memberikan pencerahan dan berbagi pengalaman dalam bidang Pemerintahan dengan Pemerintah Desa Mano, memberikan bimbingan dan pelatihan pada pemerintah desa serta mengembangkan usaha ikan di Desa Mano.

Penulis 5



Rasid Pora, S.IP.,M.IP lahir di Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara tanggal 12 Mei 1982, anak ke-5 dari 5 orang bersaudara, Ayahnya Tahir Pora, dan Ibunya bernama Hj. Hasna Umasangadji. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Ilmu

Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Tamat (2007) dan S2 di Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)/Master of Government Affair and Administration (MGAA) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) (2014). Berprofesi sebagai dosen tetap di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) sejak 2010/ sekarang. Jabatan yang pernah diemban sebagai Ketua Forum Keluarga Alumni (FOKAL) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2019-2023), Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip- UMMU (2018-2022), sekarang ia sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip- UMMU (2022-2026). Menikah dengan Eka Nurwandina, ST dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu: Barra Rizqullah Pora, Muhammad Al- Ghifari Pora dan Dira Rahmah Shanum Pora.

Beberapa artikel yang di public pada jurnal Internasional terindeks Schopus antara lain ; (1). *Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party* (2018), (2). *Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku* (2018), (3). *Implementation of Government Regulation*

No. 53/2010 About Civil State Employees Discipline In General and Equipment of Regional Secretariat Halmahera (2020) dan (4). Bureaucracy Conflicts in Border Areas: Study on Conflict Between Civilian State Apparatus and Regent in Morotai Island Regency (2021). Untuk jurnal nasional antara lain : (1). Hoax Ratna Serumpaet dan Perang Wacana di Media Sosial: Ratna Serumpaet Hoax and Discourse War on Social Media (2022), (2). Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan (2019).

Penulis juga telah menerbitkan beberapa buku bersama kolega diantaranya adalah: (1). KONFLIK dan Pergerakan Sosial, Isu-isu Kontemporer Perlawanan Masyarakat Adat, Konflik Tanah dan Konflik Kekuasaan (Graha Ilmu Yogyakarta, 2015); (2). Konflik Perebutan Ruang Hidup (Suatu Pendekatan Kibijakan dan Konsensus (Buku Litera 2021); (3). SPIRIT KAHMI, Tafsir Pemikiran Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemoderenan (Insan Cita Publishing 2021); (4). POTRET BURAM PEMERINTAHAN, Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik (Cv. Eureka Media Aksara 2022); (5). KONFLIK SENGKETA TANAH BANDARA Di WILAYAH TARAKANI (Cv. Eureka Media Aksara 2022); (6). PEMIMPIN IDEAL, Catatan Untuk Calon Kepala Daerah (Cv. Eureka Media Aksara 2023).

Penulis 6



Abdullah Kaunar, S.IP, M.A, lahir di Ternate 01 Juli 1982. Menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tahun 2000-2005 dan melanjutkan studi Magister (S2) pada Jurusan Politik Pemerintahan (JPP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2009-2011. Penulis sejak tahun 2005 hingga sekarang merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang dan pernah menjabat Sekretaris dan Ketua Program Studi.

Penulis juga terlibat aktif pada organisasi-organisasi yg bidang kajiannya yakni politik & pemerintahan. Begitu pula dengan karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan dengan tema-tema politik pemerintahan. Salah satu konsentrasi kajiannya adalah Partai Politik dan Pemilu. Tulisan yang pernah dipublikasi dalam Jurnal Internasional terindeks Scopus antara lain ; *Government Performance on Property Tax Services Of Rural And Urban Areas In Ternate City (Tahun 2018)*. Sedangkan tulisan yang pernah dipublikasi pada jurnal nasional yakni : *Dilema Air Bersih di Kota Pulau (Tahun 2021)*, dan *Pusaran Politik Dalam Rekrutmen Kandidat Partai Golkar (Studi Tentang Rekrutmen Kandidat Oleh Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2010-2015) (Tahun 2011)*.

Penulis juga berkolaborasi dengan teman-teman dosen dalam menerbitkan beberapa Buku yakni : *POTRET BURAM PEMERINTAHAN, Politik Birokrasi, Pelayanan Publik,*

Inovasi dan Konflik (Tahun 2022); dan PEMIMPIN IDEAL,
Catatan Untuk Calon Kepala Daerah (Tahun 2023).